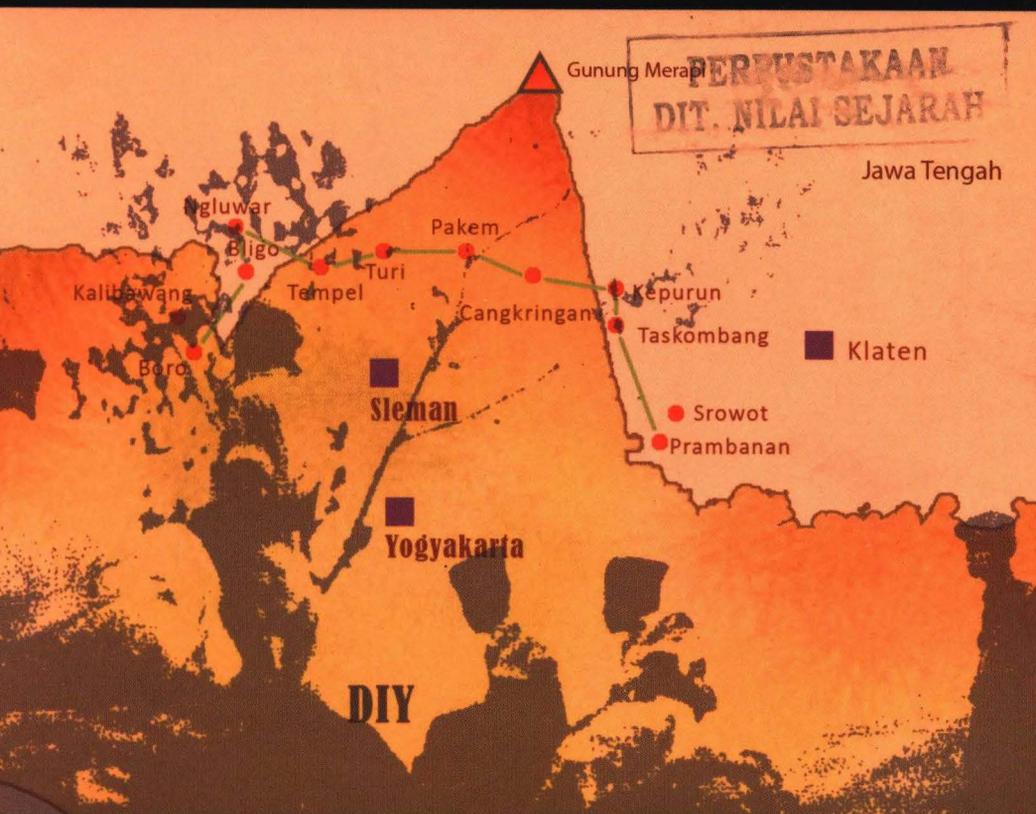


RUTE PERJUANGAN GERILYA A.H. NASUTION PADA MASA AGRESI MILITER BELANDA II

Tugas Tri Wahyono
Suhatno
Samrotul Iلمي Albiladiyah
Suwarno



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
YOGYAKARTA

RUTE PERJUANGAN GERILYA A.H NASUTION PADA MASA AGRESI MILITER BELANDA II

Disusun Oleh:

**Tugas Tri Wahyono
Suhatno
Samrotul Ilimi Albiladiyah
Suwarno**

Editor:

Dwi Ratna Nurhajarini

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
YOGYAKARTA 2011**

**Rute Perjuangan Gerilya A.H. Nasution
Pada Masa Agresi Militer Belanda II**

Disusun Oleh:

Tugas Tri Wahyono

Suhatno

Samrotul Ilmi Albiladiyah

Suwarno

© Penulis, 2011

Desain Sampul : Henry Artiawan Yudistira

Setting & Layout : Suji

Editor : Dwi Ratna Nurhajarini

Cetakan pertama: Agustus 2011

BPSNT 03.08.11

**Diterbitkan pertamakali oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Yogyakarta**

Jl. Brigjend Katamso 139 Yogyakarta

Telp. (0274) 373241, Fax. (0274) 381555

email: senitra@bpsnt-jogja.info

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun,
tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.**

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wahyono, Tugas Tri

**Rute Perjuangan Gerilya A.H. Nasution pada Masa Agresi Militer Belanda II, Tugas Tri
Wahyono, dkk, Cetakan 1, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta**

x + 90 hlm.; 15,5 x 21 cm

ISBN 978-979-8971-38-9

I. Judul

1. Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat Nya, sehingga Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta dapat menerbitkan buku hasil penelitian yang berjudul: **Rute Perjuangan Gerilya A.H. Nasution, Pada Masa Agresi Militer Belanda II.**

Buku ini merupakan salah satu hasil laporan penelitian yang dilaksanakan oleh Tugan Tri Wahyono, dkk., Staf Peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, dan diterbitkan dengan menggunakan anggaran yang tertuang dalam DIPA Tahun 2011

Tujuan penelitian ini adalah menggali dan mengungkapkan peristiwa lokal perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, khususnya perjuangan A.H Nasution dan mendokumentasikan peristiwa lokal untuk melengkapi penulisan sejarah nasional. Konsep perang gerilya yang dikemukakan A.H Nasution mencakup aspek perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu konsep perang gerilya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan sangat terbukti Belanda *kewalahan* menghadapi perlawanan rakyat. Berawal dari itulah, membuktikan bahwa manunggalnya TNI dengan rakyat merupakan kekuatan yang sangat dasyat.

Dengan terbit dan disebarluaskannya buku ini, mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi siapa saja yang ingin mempelajari, mendalami sejarah perjuangan AH. Nasution khususnya dan perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan RI pada umumnya.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu tersusunnya dan diterbitkan buku ini. Semoga buku ini dapat berguna bagi masyarakat.

Kepala,

Dra. Christriyati Ariani, M.Hum.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR FOTO | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tinjauan Pustaka..... | 5 |
| | |
| BAB II DARI KEMERDEKAAN SAMPAI AGRESI MILITER BELANDA II..... | 7 |
| A. Kekalahan Jepang, Awal Indonesia..... | 7 |
| B. Ibukota RI Diduduki Belanda | 15 |
| C. Perlawanan Rakyat Semesta | 21 |
| | |
| BAB III AKTIVITAS A.H. NASUTION DI KEPURUN, KLATEN | 30 |
| A. Kepurun sebagai Markas Gerilya..... | 30 |
| B. Aktivitas Gerilya A.H. Nasution dan Peran Masyarakat Kepurun..... | 34 |
| | |
| BAB IV AKTIVITAS GERILYA A.H. NASUTION DI BORO, KULONPROGO | 44 |
| A. Boro sebagai Markas Gerilya..... | 44 |
| B. Aktivitas Gerilya A.H. Nasution dan Peran Masyarakat Boro | 56 |

| | |
|---|-----------|
| BAB V PENARIKAN TENTARA BELANDA DAN KEMBALINYA IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA KE YOGYAKARTA..... | 65 |
| A. Penarikan Tentara Belanda..... | 65 |
| B. Ibukota RI Kembali ke Yogyakarta | 77 |
| | |
| BAB VI PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran | 83 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 84 |
| DAFTAR INFORMAN | 88 |

DAFTAR FOTO

| | | |
|----------|--|----|
| Foto 1: | Rumah Lurah Desa Taskombang, Parto Wiyono, Dukuh Jumblengan, Kel. Taskombang, Manisrenggo, Klaten..... | 32 |
| Foto 2: | Puing-puing bekas rumah Lurah Desa Kepurun, Parto Harjono Desa Pecokan, Kel. Kepurun, Manisrenggo, Klaten..... | 34 |
| Foto 3: | Rumah Bayan Tarub, Tarno Atmojo Dk. Tarub, Kel. Kepurun, Manisrenggo, Klaten | 38 |
| Foto 4: | Rumah Bayan Tarub, Tarno Atmojo Dukuh Tarub, Kel. Kepurun, Manisrenggo, Klaten (Foto Th. 2007)... | 38 |
| Foto 5: | Rumah Prawiro Harjono Dukuh Baturan, Kel. Kepurun, Manisrenggo, Klaten | 39 |
| Foto 6: | Rumah Lurah Desa Sapen, Yoso Sumarto Dukuh Sapen, Kel. Sapen, Manisrenggo, Klaten | 41 |
| Foto 7: | Rumah Bayan Kepurun, Sangadi Ronodimejo Dukuh Sanggean, Kel. Kepurun, Manisrenggo, | 41 |
| Foto 8: | Rumah Lurah Desa Banjarasri, Sastro Wiharjo Dukuh Borogunung, Kel. Banjarasri, Kec. Kalibawang, | 45 |
| Foto 9: | Rumah Pak Nitirejo Dk. Borogunung, Kel. Banjarasri, Kalibawang, (Foto Th. 1949) | 46 |
| Foto 10: | Rumah Pak Nitirejo Dk. Borogunung, Kel. Banjarasri, Kalibawang, (Foto Th. 2007) | 46 |
| Foto 11: | Bukit Menoreh (Foto tahun 1949) | 48 |
| Foto 12: | Bukit Menoreh (Foto Tahun 2007) | 48 |
| Foto 13: | Pemandangan yang dilihat dari Bukit Menoreh..... | 49 |
| Foto 14: | Peta Rute Gerilya | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua. Dengan aksi militernya itu, Belanda berusaha menghancurkan RI beserta TNI-nya. Hasilnya, selain dapat menduduki ibukota RI di Yogyakarta, Belanda juga berhasil menawan presiden, wakil presiden, dan para pejabat pemerintah sipil maupun militer lainnya. Namun pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima Besar Angkatan Perang RI Jenderal Sudirman dapat meninggalkan kota dan selanjutnya memimpin perang gerilya.

Pada saat penyerbuan Belanda ke Yogyakarta, Wakil Panglima Besar Angkatan Perang RI, Kolonel A.H. Nasution beserta rombongan tengah berada di Jawa Timur. Kolonel A.H. Nasution setelah mendapat laporan tentang peristiwa 19 Desember 1948 itu, kemudian segera bersiap-siap untuk kembali ke Yogyakarta. Namun perjalanan dari Jawa Timur itu tidak dapat sampai ke tempat tujuan. Mereka hanya sampai di daerah Prambanan, hal itu disebabkan tentara Belanda telah menguasai medan sampai di daerah Kalasan yang berbatasan dengan Prambanan. Oleh karena itu, Kolonel A.H. Nasution memerintahkan kepada seluruh rombongan untuk segera menuju utara ke lereng Gunung Merapi (Notosusanto, 1973: 31).

Kira-kira jam sepuluh malam rombongan Kolonel A.H. Nasution tiba di Desa Taskombang setelah sejak sore hari berjalan kaki dari daerah Prambanan. Rombongan pada malam itu kemudian beristirahat di Desa Taskombang (Nasution, 1983: 83). Esok harinya, tanggal 20 Desember 1948, Kolonel A.H. Nasution disertai beberapa orang perwira telah sampai

di Desa Kepurun. Dari Desa Kepurun itulah Kolonel A.H. Nasution kemudian mengeluarkan maklumat kepada seluruh Angkatan Perang RI untuk segera memberlakukan strategi perang gerilya yang sebelumnya memang telah dirancang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya serangan Belanda yang kedua (Nasution, 1953: 127-137).¹

Semenjak jatuhnya ibukota RI di Yogyakarta sebagai akibat dari serbuan tentara Belanda itu, maka suasana revolusi mulai mewarnai kehidupan pedesaan. Daerah pedesaan oleh para pejuang RI dijadikan tempat pertahanan dan tempat pengungsian. Mereka yang datang ke daerah pedesaan itu terdiri dari bermacam-macam kesatuan pejuang dan penduduk dari kota, sehingga rute perjuangan mereka pada masa Agresi Militer Belanda II itu sangat berpengaruh terhadap para gerilyawan dalam menghadapi tentara Belanda.

Mengingat suasana revolusi, maka rute-rute gerilya para pejuang tidak ayal lagi banyak melalui wilayah pedesaan, termasuk yang dilakukan oleh Kolonel A.H. Nasution dari wilayah Taskombang, Klaten sampai perbukitan Manoreh, Kulonprogo. Dari rute gerilya A.H. Nasution tersebut ada hal yang menarik untuk dieksplanasikan sesuai dengan konsep perang gerilya. Konsep itu menyangkut strategi perjuangan dalam menghadapi tentara Belanda, karena TNI pernah gagal ketika menghadapi Agresi Militer Belanda I tahun 1947.

Pada waktu itu, pola pertempuran yang dilakukan oleh TNI dalam menghadapi tentara Belanda masih menggunakan strategi linier, artinya berhadapan langsung secara frontal dengan musuh meskipun kalah dalam hal persenjataan. Oleh karena itulah TNI mengalami banyak kegagalan di berbagai medan pertempuran. Bercermin dari pengalaman itu, maka A.H. Nasution mengubah strategi linier menjadi strategi gerilya. Dengan strategi yang baru itu, hasilnya dapat dirasakan ketika TNI menghadapi tentara Belanda pada Perang Kemerdekaan II tahun 1948-1949 yakni dengan mundurnya tentara Belanda dari bumi Indonesia.

1 Maklumat yang dimaksud adalah Maklumat No. 2/MBKD, Tanggal 22 Desember 1948 tentang Berlakunya Pemerintahan Militer untuk Seluruh Pulau Jawa, dan Instruksi No. 1/MBKD/48, Tanggal 25 Desember 1948 tentang Bekerja Pemerintahan Militer Seluruh Jawa.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 banyak diwarnai oleh berbagai peristiwa penting yang menyertainya. Adanya Perang Kemerdekaan I tahun 1947, dilanjutkan dengan Perang Kemerdekaan II tahun 1948-1949 membuktikan bahwa cita-cita kemerdekaan yang didambakan bangsa Indonesia itu mendapatkan hambatan dan tantangan yang cukup berat. Bangsa Indoensia harus menghadapi bangsa Belanda yang hendak menguasai kembali wilayah Indonesia.

Setelah banyak mengalami kerugian dan kegagalan dalam Perang Kemerdekaan I, maka dalam menghadapi serangan Belanda yang kedua, TNI bersama-sama dengan rakyat Indonesia mengubah strategi pertempurannya yakni dari strategi linier menjadi strategi gerilya. Strategi perang gerilya itu menyertakan seluruh komponen bangsa, sehingga seluruh Pulau Jawa dan kelak Nusantara akan menjadi suatu medan perang gerilya yang luas (Notosusanto, 1973: 13). Oleh karena itu, A.H. Nasution yang merupakan perancang atau arsitek dari perang gerilya yang menyertakan seluruh komponen bangsa itu menyebutnya sebagai Perang Rakyat Semesta (Nasution, 1983: 71).

Mengingat jasa yang disumbangkan oleh A.H. Nasution dengan konsepnya Perang Rakyat Semesta itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup negara RI dalam menghadapi kembalinya penjajah Belanda, maka dalam kajian ini dipandang perlu untuk mengungkapkan bagaimana konsep Perang Gerilya Semesta itu dan bagaimana aktivitas A.H. Nasution selama Perang Kemerdekaan II tahun 1948-1949.

Dengan mengungkapkan aktivitas A.H. Nasution selama perang gerilya, maka kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyertainya diharapkan akan dapat ditampilkan pula, seperti rute gerilya A.H. Nasution selama Perang Kemerdekaan II, kemudian bagaimana peranan atau dukungan masyarakat pedesaan dalam keikutsertaannya menyelenggarakan pertahanan rakyat total, serta jaringan-jaringan komando yang terbentuk selama Perang Kemerdekaan II itu. Perlu ditambahkan, bahwa sampai sekarang penulisan tentang rute perjuangan gerilya A.H. Nasution belum

sempat dikerjakan walaupun pada waktu itu beliau masih hidup, ide tersebut sudah terpikirkan.

Ruang lingkup temporal kajian ini meliputi kurun waktu antara tahun 1948-1949. Tepatnya dimulai pada tanggal 19 Desember 1948 ketika terjadi peristiwa Agresi Militer Belanda yang kedua sampai terjadinya peristiwa penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dan kembalinya para pemimpin TNI beserta pemimpin pemerintahan RI ke Yogyakarta pada awal bulan Juli 1949.

Adapun ruang lingkup spasialnya mengikuti jalur gerilya A.H. Nasution dari Taskombang (Kepurun), Kabupaten Klaten sampai perbukitan Menoreh (Boro), Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang menitikberatkan pada studi bahan dokumen. Oleh karena itu, sejalan dengan bidang kajian sejarah yang memusatkan perhatiannya pada masa lampau itu, maka dalam proses metode sejarah biasanya ditempuh melalui empat tahap. Pertama, adalah heruistik, yaitu proses mencari dan menemukan sumber-sumber. Tahap kedua, yaitu kritik sumber, meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern, yakni menyangkut keaslian dokumen-dokumen, sedangkan kritik intern menyangkut isi dari dokumen-dokumen itu sendiri. Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran. Kemudian tahap terakhir adalah proses ke dalam penulisan sejarah atau historiografi (Notosusanto, 1978: 11).

Untuk melengkapi data-data atau kesaksian yang diperoleh dari bahan dokumen diperlukan bahan pembanding berupa hasil wawancara dengan para pelaku sejarah. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang telah diperoleh tersebut cukup kredibel. Selanjutnya studi bahan pustaka akan dimanfaatkan sebagai sumber acuan dalam penulisan sejarah yang berhubungan dengan topik penulisan. Disamping itu, kegiatan pengamatan dan observasi akan dilaksanakan pula guna membantu menguji dan mengecek fakta dan data yang telah ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa lokal yang berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan

RI, khususnya perjuangan A.H. Nasution pada masa Perang Kemerdekaan II. Disamping itu juga untuk mencatat dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa lokal untuk melengkapi penulisan sejarah nasional.

Penelitian dan penulisan yang berkaitan dengan rute perjuangan gerilya A.H. Nasution pada masa Perang Kemerdekaan II tahun 1948-1949 sangat bermanfaat bagi perkembangan studi sejarah revolusi di tingkat lokal. Selain itu, para tokoh yang terlibat dalam perjuangan gerilya di daerah-daerah itu dapat menunjukkan eksistensi dan peranannya untuk tujuan dan kepentingan yang lebih besar di tingkat nasional.

B. Tinjauan Pustaka

Karya utama yang dimanfaatkan untuk mendukung penelitian dan penulisan dengan tema Rute Perjuangan Gerilya A.H. Nasution: Dari Taskombang sampai Perbukitan Menoreh pada Masa Agresi Militer Belanda II yakni sebuah otobiografi atau memoar A.H. Nasution berjudul *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 2: Kenangan Masa Gerilya*, yang diterbitkan CV Haji Masagung tahun 1983.

Buku riwayat hidup atau memoar A.H. Nasution itu memuat uraian tentang permasalahan-permasalahan kemiliteran maupun kenegaraan, juga peristiwa-peristiwa penting yang menyertainya sebagaimana yang telah beliau alami sendiri dalam kurun waktu tahun 1948-1949. Dalam pernyataannya, A.H. Nasution menulis:

”.....periode 1945-1949 adalah salah satu periode yang terpenting dalam sejarah bangsa dan tanah air kita. Karena dalam periode inilah rakyat berkorban habis-habisan, dan menderita tak terhingga, buat mencapai sekaligus mempertahankan kemerdekaan dan persatuan nasional kembali, setelah melewati masa penjajahan dan perpecahan berabad-abad lamanya.

Banyak kekurangan dan kesalahan yang telah kita perbuat sebagai bangsa dan negara. Namun pada hakikatnya ternyata cukup mampu dan ulet buat menyelamatkan hari kemudian kita sebagai bangsa yang merdeka dan berbahagia melalui suatu perang rakyat semesta.....” (Nasution, 1983: vii).

Pada bagian lain beliau menyatakan:

”.....tentara kita dewasa itu bukanlah tentara yang terbiasa dengan cara-cara yang lazim, melainkan suatu tentara revolusi yang bangkit serentak dengan dan dalam gelora revolusi itu sendiri”.

”Bahwasanya perjuangan gerilya dalam revolusi kita itu jauh dari sekedar ketentaraan semata-mata”. ”Maka pejuang gerilya itu tiada terbatas pada TNI dan laskar saja, melainkan Pak Lurah, Pak Camat, pegawai nonkooperator, duta perjuangan, tukang becak, penyelidik, buruh, penyabot, Pak Tani pemberi pemondokan, perbekalan dan sebagainya” (Nasution, 1983: vii).

Sumber pustaka lainnya yang juga dapat mendukung penulisan ini, antara lain *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 9-10* (1994) dan *Pokok-pokok Gerilya* (1953), keduanya ditulis oleh A.H. Nasution; kemudian *Markas Besar Komando Djawa* (1973) oleh Nugroho Notosusanto (Ed.); *Laporan dari Banaran* (1980) ditulis oleh T.B. Simatupang; dan sebagainya.

BAB II

DARI KEMERDEKAAN SAMPAI AGRESI MILITER BELANDA II

A. Kekalahan Jepang, Awal Indonesia

Setelah Jepang kalah perang melawan tentara Sekutu dan menyerah pada tahun 1945, maka Jepang harus tunduk pada Sekutu. Walaupun kemudian Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diwakili oleh Soekarno-Hatta, namun Jepang tidak mengakuinya karena berpegang pada komitmen tanggal 15 Agustus 1945 yaitu menyerah kepada Sekutu (Notosusanto, 1983: 109).

Mengetahui demikian, para pemuda pejuang Indonesia yang berkeinginan cepat menduduki tempat-tempat penting berkaitan dengan kompetensi perjuangan bangsa, para pemuda mendesaknya dan akibatnya selalu berhadapan dengan Jepang. Oleh karena itu jika kedua belah pihak saling bersikeras mempertahankan pendiriannya, dari pihak Indonesia ingin menduduki, sedangkan dari pihak Jepang ingin mempertahankan, maka dapat dipastikan terjadi benturan-benturan yang tak dapat dihindari. Mengenai keharusan Jepang patuh terhadap Sekutu, walaupun kebanyakan mereka patuh, namun ternyata ada perwira Jepang, bersimpati terhadap Indonesia, misalnya Laksamana Maeda (Hiroshi Maeda) yang sangat menghargai perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan (Sufian, 1987).

Pada masa akhir pendudukan Jepang, di mana-mana terjadi perebutan kekuasaan antara Jepang dengan Indonesia. Di Yogyakarta ada salah satu kelompok pejuang yaitu kelompok Patuk di bawah pimpinan Kusumo Sunjoyo, semasa pendudukan Jepang memimpin gerakan bawah tanah. Dalam keterangannya C.H. Marsoedi, mengatakan bahwa dirinya pada akhir

pendudukan Jepang, masuk ke kelompok Patuk ini. C.H. Marsoedi sebagai anggota kelompok, mendapat tugas memberikan informasi tentang seluk beluk markas Jepang di Kotabaru. Selain itu juga mengambil alih sekitar 12 pucuk senjata milik Jepang di Kantor Pos. Kelompok Patuk ini juga mengorganisasi penurunan bendera Hinomaru di Cokan Kantai (Gedung Agung) dan menggantikannya dengan Merah Putih (Marsoedi, 1987/1988: 6).

Kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia di bawah Komando Asia Tenggara atau *Southeast Asia Command* dengan pimpinannya Laksamana Lord Louis Mountbatten. Secara berturut-turut Sekutu menerjunkan perwiranya yaitu Mayor Green Halgh di Kemayoran, Jakarta, menyusul berlabuhnya kapal penjelajah *Cumberland* dengan pasukan dan Panglima Skwadron Penjelajah V Inggris yaitu Laksamana Muda W.R.Patterson di Tanjung Priok. Pasukan Sekutu yang ditugaskan ke Indonesia tersebut merupakan komando bawahan dengan tiga divisi dari Komando Asia Tenggara yang bernama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Phillip Christison. Tugasnya di Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia khususnya dengan Jepang.

Kedatangan Sekutu ke Indonesia dibarengi *NICA* atau *Netherlands Indies Civil Administration* yaitu organisasi pemerintah sipil Belanda yang bertugas menguasai kembali daerah jajahan, Indonesia (Notosusanto, 1982/1983: 109). Pengalaman telah memberikan kepada bangsa Indonesia akan suatu kewaspadaan bagaimana jika melihat Belanda. Oleh karena itu bangsa Indonesia yang telah kenyang dan merasakan pahit getirnya perjuangan bersikap waspada. Sehubungan dengan kekacauan yang tak kunjung henti di ibukota Jakarta, maka memunculkan wacana tentang pemindahan ibukota ke tempat yang aman. Setelah melalui proses dalam sidang kabinet, maka diputuskan ibukota dipindahkan dari Jakarta. Tanggal 4 Januari 1946 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta beserta rombongan meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta. Sehingga saat itu resmilah Yogyakarta sebagai ibukota Republik.

Walaupun ibukota RI dijauhkan dari Jakarta dan menempati tempat yang baru yaitu di Yogyakarta, namun Belanda selalu mencari-cari dan mencuri

kesempatan bagaimana caranya dapat menguasai Indonesia kembali. Upaya damai antara pihak yang bertikai memang selalu diadakan. Selanjutnya diadakan perundingan di Linggajati, sebelah selatan Cirebon pada tanggal 10 November 1946 yang hasilnya diumumkan tanggal 15 November.

Pada intinya dalam perundingan tersebut Belanda secara *de facto* mengakui adanya wilayah negara Republik Indonesia mencakup Sumatera, Jawa dan Madura, Kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia bersama-sama menanggapi terbentuknya Negara Indonesia Serikat, Pemerintah Negara Indonesia Serikat dan Belanda bersama-sama membentuk Uni Indonesia-Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda (Soetardono, 1977: 30; Notosusanto, 1982/1983: 121)

Hasil perundingan tersebut menimbulkan pro dan kontra. Golongan yang pro beranggapan bahwa perundingan adalah suatu alat saja, untuk selanjutnya dicarikan jalan keluar bagi perjuangan bangsa, memperbarui kedudukan politik. Bagi yang kontra karena merasa bahwa hasil perundingan memang menguntungkan Belanda dan merugikan Indonesia. Menghadapi dua kelompok tersebut, pemerintah kemudian merevisi keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 25 Maret 1947 (Notosusanto, 1982/1983: 123).

Keinginan Belanda untuk tetap berpengaruh atas Indonesia, mendorong Belanda melanggar perjanjian yang telah disetujuinya sendiri dengan melakukan Agresi Militer Pertama tanggal 21 Juli 1947 (Poerwokusumo, 1987: 28).² Dalam agresinya itu Belanda melancarkan serangan yang diarahkan ke daerah pertahanan Republik Indonesia, terutama lapangan terbang Maguwo. Oleh karena itu secara diam-diam Sutan Syahrir meninggalkan Yogyakarta menuju ke luar negeri, Amerika, Inggris, India, dengan membawa pesan pemerintah tentang sikap Indonesia dan pelanggaran yang telah dilakukan Belanda. Tindakan Belanda yang tidak mengenal etika tersebut menuai kritikan dan negara-negara sahabat

2 Dipandang dari kacamata Belanda, tindakan penyerangan terhadap RI itu dinamakan Aksi Polisionil (*Actie Politieeesh*), yaitu aksi untuk menertibkan kekacauan yang terjadi di suatu wilayah yang menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Indonesia berpendapat, bahwa peristiwa tersebut dinamakan Aksi Militer karena menyerang suatu negara yang telah diakui oleh Belanda dalam Perjanjian Linggajati.

tersebut bersimpati atas perjuangan rakyat Indonesia yang kemudian disampaikan dan diterima oleh Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 29 Juli 1947 India menyumbang obat-obatan kepada Palang Merah Indonesia yang dibawa dengan pesawat Dakota VT-CLA milik Patnaik, namun ditembak jatuh oleh pesawat pemburu Belanda di Desa Ngotho, sebelah selatan Yogyakarta. Gugur dalam peristiwa itu antara lain: Komodor Muda Udara A. Adisutjipto, Komodor Udara Dr. Abdurrachman Saleh, dan Opsir Muda Udara I Adisumarno Wiryokusumo (Soetardono, 1977: 32).

India juga membantu di bidang pertahanan udara dengan ikut melatih calon-calon penerbang Indonesia dan membantu perjuangan diplomasi di forum internasional. Negara Mesir membantu mengirim obat-obatan, yang tiba di Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 1948 (Soetardono, 1977: 32). Berdasarkan pengalaman menghadapi Belanda itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemudian mempersiapkan rencana untuk menghadapi serangan Belanda selanjutnya (Notosusanto, 1982/1983: 167).

Tentang Agresi Militer Belanda yang pertama tahun 1947, dari sudut pandang Belanda, seorang wartawan perang bernama Alfred van Sprang memfotokan situasi malam menjelang agresi di Jawa, keadaannya tidak mengenakkan. Mereka menilai bahwa di dalam Republik Indonesia, anarki meningkat, adanya kekacauan dari seberang garis demarkasi. Selain itu Belanda juga memandang bahwa ada pertikaian antar kelompok perjuangan, timbul pertentangan antar pengikut TRI (Tentara Republik Indonesia), Laskar Rakyat dan organisasi-organisasi lain. Penduduk mengeluh karena adanya rezim teror dan semena-mena, harga beras mahal, sedangkan kesehatan menurun. Keadaan tidak aman, tiap hari terjadi sabotase, makin banyak kendaraan kena ranjau darat, paku sengaja ditebarkan di jalan antara Jakarta-Kranji, terjadi pemotongan kawat telepon berkali-kali. Pelanggaran kesepakatan meningkat, gencatan senjata yang telah disetujui dalam Linggajati hanya tinggal kata-kata yang tidak ditaati. Pemerintah Belanda berupaya semaksimal mungkin mencari solusi terbaik, namun yang berkembang sebaliknya. Dalam keadaan demikian patut ditanyakan bagaimana jika harus terjadi peristiwa aksi militer yang tidak dapat dihindari (Hejboer, 1998: 32).

Peristiwa agresi militer yang dilakukan Belanda mengundang simpati banyak negara, selanjutnya diteruskan ke Dewan Keamanan PBB. Organisasi dunia ini kemudian membentuk sebuah komisi jasa baik pada tanggal 27 Agustus 1947 dengan tujuan untuk menyelesaikan pertikaian yang berkepanjangan antara Indonesia dengan Belanda. Komisi jasa baik untuk mencari perdamaian tersebut dinamakan Komisi Tiga Negara (KTN), yaitu Australia yang ditunjuk Indonesia sebagai wakil Indonesia, Belgia mewakili Belanda, sedangkan Amerika dipilih oleh Australia dan Belgia. Para diplomat anggota komisi tersebut yaitu Dr. Frank B. Graham dari Amerika, Richard C. Kirby dari Australia, Paul van Zeeland dari Belgia. Pada tanggal 27 Oktober 1947 para anggota Komisi Tiga Negara tersebut tiba di Indonesia, untuk mengawasi jalannya perundingan perdamaian antara Indonesia dengan Belanda, dengan demikian maka KTN mulai dapat bekerja (Notosusanto, 1982/1983: 126).

Walau dibentuk komisi jasa-jasa baik, KTN, mempunyai tujuan untuk mencari jalan keluar dari keruwetan pertikaian antara Belanda dengan Indonesia, namun kenyataannya sangat sulit dilaksanakan. KTN menghubungi Indonesia maupun Belanda untuk membicarakan pertemuan keduanya, tetapi masing-masing baik Indonesia maupun Belanda tidak menghendaki berada di tempat lawan. Oleh karena masing-masing bersikukuh, maka Amerika menawarkan tempat untuk berunding tersebut di sebuah kapal angkut pasukan yaitu kapal Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Tawaran Amerika tersebut disambut baik oleh Indonesia maupun Belanda.

Pembukaan perundingan di atas kapal Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 antara Indonesia, Belanda, disertai KTN yang selalu berusaha mendekatkan keduanya (Notosusanto, 1997: 33). Dalam perundingan diwarnai perdebatan antara Indonesia dengan Belanda. Keduanya mempermasalahkan tentang gencatan senjata (*cease fire*) dan garis demarkasi van Mook. Pendekatan dan pembicaraan diadakan di Jakarta maupun di Kaliurang, Yogyakarta secara berganti-ganti. Dari pembicaraan itu masing-masing yang bertikai menyanggupi untuk

mengadakan gencatan senjata, menyetujui adanya garis demarkasi antara wilayah Indonesia dan daerah yang diduduki Belanda, penarikan mundur Tentara Nasional Indonesia dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur ke daerah wilayah Republik di Yogyakarta. Namun demikian walaupun telah berunding, di sisi lain terjadi pelanggaran-pelanggaran, Belanda menyerbu daerah-daerah dan mendudukinya, salah satu contohnya seperti yang dilakukan di daerah Kedu Utara (Notosusanto, 1982/1983: 126).

Dari pihak Indonesia, para pejuang dengan sendirinya juga semakin aktif mengangkat senjata untuk melawan. Stasiun Radio Yogyakarta gencar menyuarakan aktivitas para pejuang gerilya dan membakar semangat pemuda untuk memertahankan Republik ini. Perang yang terus-menerus tersebut membawa efek bermacam-macam di pihak Indonesia maupun Belanda. Di pihak Indonesia, di antara para ahli politik ada yang meragukan kekuatan bangsa sendiri, sehingga terbersit suatu rencana untuk mengangkat permasalahan ini ke tangan PBB lagi. Dari pihak Belanda, mereka yakin setelah angkatan perang Republik Indonesia dapat digempur, banyak para nasionalis yang mau diajak kerjasama dengan Belanda dan mau menuruti kebijaksanaan van Mook (Nasution, 1978: 440).

Oleh karena persoalan antara Belanda dan Indonesia sulit mendapatkan titik temu, maka KTN mengusulkan sebuah konsep penyelesaian integral, yang kemudian dikenal dengan sebutan 'Pesan Natal' atau *Christmas Message*. Konsep penyelesaian pertikaian yang diusulkan KTN tersebut isinya yaitu pertama: *immediate standfast and cease fire* (berdiri tegak di tempat dan penghentian tembak-menembak), kedua : pengulangan kembali pokok dasar Perundingan Linggajati (Notosusanto, 1982/1983: 127). Bagi Indonesia usulan KTN itu tidak menarik karena perundingan yang pernah dilakukan (Linggajati), walaupun telah ditandatangani, namun Belanda telah melanggarnya. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh KTN, maka pada tanggal 17 Januari 1948 naskah persetujuan Renville ditandatangani. Persetujuan Renville berisi tentang gencatan senjata antara pihak RI dengan Belanda, pokok-pokok utama

perundingan untuk penyelesaian politik antara Indonesia dan Belanda (Notosusanto, 1982/1983: 127).

Pemerintah dan bangsa Indonesia pada masa revolusi menghadapi banyak hal yang menjadi hambatan jalannya perjuangan anak bangsa. Mulai adanya sikap pro dan kontra antara kelompok satu dengan lainnya tentang Perjanjian Renville, kemudian adanya Agresi Militer Belanda tahun 1947. Selanjutnya pada tahun 1948 terjadi perpecahan di dalam Partai Sosialis, juga adanya kelompok Sjahrir dan kelompok Amir Syarifuddin. Kelompok Sjahrir membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI), sedangkan kelompok Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR ini terdiri dari Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia (PBI), PKI, merupakan oposisi terhadap Kabinet Hatta dan kemudian menjelma menjadi PKI Muso (Notosusanto, 1982/1983: 108). PKI Muso ini kemudian melakukan upaya untuk mengambil alih kekuasaan yang ada di Madiun pada tahun 1948.

Pada waktu itu di daerah Madiun berkembang politik di bawah mayoritas kelompok perjuangan yang berkiblat pada golongan sosialis. Kelompok-kelompok golongan sosialis tersebut misalnya, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dari kalangan pemuda dipimpin oleh Sumarsono, sedangkan Serikat Rakyat (SR) dari kalangan tua dipimpin oleh Sadi Singomentolo dan Pak Diko (Anderson, 2003: 50). Selain itu juga ada Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kemudian bergabung dengan Partai Komunis Indonesia pimpinan Muso. Dibandingkan dengan golongan nasionalis dan agama walaupun telah digabung, maka golongan sosialis di daerah Madiun mempunyai pengaruh yang lebih besar. Keadaan menjadi lebih kacau setelah terjadi lomba pengaruh di antara golongan-golongan tersebut terhadap masyarakat, kalangan orang beragama, santri juga terhadap kelompok militer. Sehingga ada dua kubu yang saling berhadapan, masing-masing mengandalkan kesatuan-kesatuan tertentu dari angkatan perang, yang pro pemerintah dan yang kontra.

Pada tanggal 18 September 1948 di sebelah utara Madiun, tepatnya di sekitar pabrik gula Mojoagung waktu dinihari terjadi tembakan pertempuran, upaya pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan oleh

Komunis, Pesindo, BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia), Detasemen Polisi non reguler dengan menyerbu Markas Divisi Mobil, barak-barak CPM, menangkapi pasukan pemerintah yang tidak menyadari akan peristiwa tersebut. Untuk sementara Komunis memperoleh kemenangan, dan Madiun diduduki. Tanggal 19 September 1948 pukul 21.30 Muso berpidato di radio Madiun bahwa pasukannya akan melawan makelar *romusha*³ dan kelompok borjuis dalam Kabinet Hatta yang dinilai gagal dalam memenuhi janji revolusi (Anderson, 2003: 72).

Peristiwa Madiun terasa sampai ke daerah-daerah. Gerakan yang dilakukan oleh Komunis bertujuan untuk menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat dan memanas-manasnya, supaya kepercayaan pada pemerintah berkurang. Tentara yang berada di daerah pedalaman diadu domba terutama terhadap tentara Siliwangi. Jika upaya tersebut berhasil, tentara terpecah-belah, masyarakat gelisah, maka pemerintah akan mudah dilumpuhkan. Di Solo, Divisi IV dapat dimasuki oleh penyelundup pengacau yang diketuai oleh Yadau dan Suyoto, dua orang bekas anggota angkatan laut yang dimanfaatkan oleh kepentingan PKI. Kesatuan-kesatuan Brigade 29 bekas kelaskaran di bawah pimpinan Letnan Kolonel Dahlan telah mengkhianati negara (Kementerian Penerangan, 1953: 284). Melihat kenyataan demikian Presiden Soekarno segera memerintahkan Panglima Besar Sudirman untuk memulihkan kekuasaan pemerintah di Madiun. Pemerintah bereaksi sangat cepat. Presiden Soekarno berpidato dalam siaran radio yang isinya bahwa masyarakat dapat memilih antara Muso dengan PKI, atau Soekarno-Hatta yang insya Allah berupaya agar Republik Indonesia merdeka tidak akan pernah dijajah lagi oleh negara mana pun di dunia (Heijboer, 1998: 134-135).

Kekacauan di Madiun ditimbulkan oleh bangsa Indonesia sendiri, namun kemudian Tentara Nasional Indonesia cepat mengambil sikap tegas, walaupun dengan peralatan terbatas kemudian dapat menguasai daerah wilayah Republik Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan, demi untuk menyelamatkan negara dari rongrongan sekelompok golongan,

3 Muso menyatakan bahwa yang dimaksud dengan makelar *romusha* adalah Bung Karno karena dianggap telah mendorong para pemuda untuk menjadi *romusha* yang bekerja pada Jepang.

walaupun pada masa itu di bawah tekanan blokade ekonomi dari Belanda.⁴ Keberhasilan Indonesia dalam menumpas pemberontakan Madiun mendapatkan apresiasi di dunia internasional terutama dari negara Amerika Serikat (Anderson, 2003: 107; Notosusanto, 1982/1983: 130)

B. Ibukota RI Diduduki Belanda

Selang dua setengah bulan setelah adanya peristiwa Madiun, Yogyakarta yang kala itu sebagai ibukota RI dihentakkan adanya serangan mendadak tanggal 19 Desember 1948. Serangan tersebut dilancarkan pihak Belanda yang sasarannya adalah wilayah Indonesia. Belanda telah melakukan agresi militer lagi setelah agresi militer pertamanya pada tahun 1947. Jelasnya peristiwa tersebut merupakan agresi militer Belanda yang kedua. Peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari. Sekitar pukul 05.15 terdengar suara deru pesawat terbang di atas Kota Yogyakarta. Semula banyak yang mengira kalau suara tersebut suara para tentara yang sedang berlatih perang, karena memang hari Minggu dan jam tersebut merupakan hari latihan perang. Akan tetapi makin lama suara deru pesawat terbang terdengar semakin membisingkan, karena banyak jumlahnya (Kementerian Penerangan, 1953: 383). Sebagian dari pesawat-pesawat yang terbang di atas Kota Yogyakarta kemudian melepaskan tembakan-tembakan, menjatuhkan granat-granat, bom ke beberapa sasaran. Terlihat banyak tentara Belanda dengan parasutnya yang diterjunkan dari atas pesawat di Maguwo. Tentu saja tempat-tempat yang terkena sasaran serangan tersebut mengalami kerusakan. Masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya, juga para pengunjung dari berbagai tempat yang ada di Yogyakarta sangat panik dan bingung. Para pengunjung tersebut antara lain berasal dari Jawa Barat, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Surabaya, semuanya tidak tahu harus mengunjungi ke mana lagi (Kementerian Penerangan, 1953: 383).

Mendaratnya pesawat Belanda di Maguwo dengan sejumlah pasukannya secara mendadak itu, sebenarnya telah direncanakan oleh Belanda yang ingin

4 Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda melakukan blokade ekonomi yang dimulai pada bulan November 1945, tujuannya untuk melemahkan Republik Indonesia dengan senjata ekonomi. Harapan Belanda, dengan blokade ekonomi itu keadaan sosial ekonomi Indonesia memburuk, kekurangan bahan-bahan impor, dan seterusnya. Dengan kata lain, secara ekonomis Belanda ingin menghancurkan Indonesia.

menghilangkan kekuasaan RI. Dinas rahasia Indonesia tidak dapat menangkap rencana itu, karena instansi-instansi yang bertugas tengah mengadakan penyelidikan hubungan dengan luar negeri. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk menyerang Indonesia. Pada malam pukul 23.30 sebelum serangan Belanda atas ibukota Yogyakarta, Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Beel berpidato di radio bahwa Belanda tidak lagi terikat pada Perjanjian Renville. Sebelumnya pun Belanda sudah menyatakan bahwa tidak ada perlunya mengadakan perundingan dengan Indonesia (Nasution, 1979: 179-180). Pernyataan Belanda bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian yang telah disepakati itu artinya dengan bebas melakukan pelanggaran, termasuk mengangkat senjata terhadap Indonesia dan menduduki ibukota yang saat itu berada di Yogyakarta.

Pada saat serangan Belanda atas lapangan terbang Maguwo, pertahanan di tempat tersebut tidak penuh, karena hanya diselenggarakan oleh setengah kompi taruna Angkatan Udara Republik Indonesia. Perwira dinas yang bertugas di Maguwo pada saat itu adalah Kasmiran dan rekan-rekannya. Petugas dikejutkan oleh ledakan bom yang dilakukan oleh tiga pesawat Mitchell AU Belanda disertai dengan pendaratan pasukan payung. Setelah pesawat Mitchell disusul kemudian pesawat pemburu yang merusakkan bangunan serta pos-pos senapan mesin dengan roket (Heijboer, 1998: 142). Sementara itu pesawat Dakota mendaratkan pasukannya yang berisi dua kompi Pasukan Khusus merupakan prajurit-prajurit terlatih Belanda, sebagian terdiri dari etnik Ambon dan Timor. Para taruna AU yang menghadapi musuh demikian tidaklah imbang kekuatannya, sehingga banyak taruna AU calon penerbang yang gugur dalam bentrokan itu. Ironisnya lapangan terbang Maguwo yang saat itu tengah diduduki musuh tidak diketahui sama sekali oleh awak pesawat Catalina Republik yang memuat para perwira TNI dan baru kembali bertugas dari Singapura. Sehingga tanpa menaruh kecurigaan pilot pesawat ini mendarat di sela-sela pesawat Dakota Belanda. Oleh karena itu setelah mendarat, pilot beserta para perwira TNI langsung dapat ditawan Belanda tanpa kesukaran yang berarti.

Peristiwa tanggal 19 Desember 1948 di Maguwo telah mengejutkan para petinggi pemerintah. Pagi itu juga Kapten Suparjo, ajudan Jenderal

Sudirman, mendapat perintah untuk menghadap presiden di istana (Gedung Agung) untuk menanyakan langkah lebih lanjut setelah adanya serangan Belanda pagi itu. Namun setelah menunggu beberapa waktu, ajudan tersebut belum ada jawaban. Oleh karena belum juga ada keputusan, maka sejam kemudian dalam keadaan sakit Jenderal Sudirman sendiri menghadap Presiden Sukarno membicarakan masalah itu. Jenderal Sudirman juga minta izin untuk ikut bergerilya bergabung dengan para pejuang (Nasution, 1979: 184). Sebelum menghadap presiden, Jenderal Sudirman menyempatkan membuat Perintah Kilat yang ditujukan kepada segenap anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Sebelum keluar kota Jenderal Sudirman berpesan kepada Kapten Suparjo supaya mengumumkan Perintah Kilat tersebut lewat radio, sebagai tanda dimulainya perang gerilya. Berikut isi lengkap dari perintah kilat itu (Nasution, 1979: 185).

PERINTAH KILAT
No. I/P.B./D/48

1. Kita telah diserang.
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo.
3. Pemerintah Belanda telah membatalkan Persetujuan Gencatan Senjata.
4. Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.

Dikeluarkan di tempat.
Tanggal : 19 Desember 1948
Jam : 08.00

Panglima Besar Angkatan Perang
Republik Indonesia

ttd
Letnan Jenderal SUDIRMAN

Tanpa mengindahkan pembicaraan-pembicaraan yang tengah dilakukan oleh KTN di Kaliurang, setelah pemboman di Maguwo, Belanda mencari sasaran selanjutnya. Pesawat-pesawat Belanda mengarahkan sasarannya ke kota, jalan, jembatan, bangunan. Menyusul jatuhnya bom ke tempat-tempat lain misalnya di Tugu di Jalan Gondolayu. Sementara para pejabat Indonesia berembug mengadakan sidang darurat di istana, dari Maguwo pasukan Belanda bergerak menuju ke arah barat. Kota Yogyakarta pada sekitar pukul 08.30. Mereka menggunakan dua jalan yang ada, yaitu jalan utama Yogya-Solo dan jalan yang ada di sebelah selatan, jalan Wonosari-Yogya (Heijboer, 1997: 143). Sekitar pukul 09.00 pagi Benteng yang berada di depan istana Gedung Agung dijatuhi bom pembakar, sehingga api menjalar ke mana-mana (Nasution, 1979: 211). Akhirnya Kota Yogyakarta berhasil diduduki Belanda.

Sementara itu di kota tentara Republik bersiap-siap merencanakan serangan balasan. KSAU Suriadarma menganjurkan supaya menggunakan pemancar-pemancar radio untuk menyebarkan informasi, perintah, atau juga pengumuman agar informasi tersebut cepat sampai di tujuan dan efisien. Untuk menyelamatkan peralatan komunikasi radio dari operasi Belanda, pemancar radio *AURI call sign PC II* oleh Budiharjo, Widodo, Sungkono dan Basuki dipindahkan ke Desa Banaran, Gunungkidul. Stasiun radio tersebut bertempat di rumah seorang penduduk bernama Ny. Pawirosetomo. Agar tidak mencolok peralatan ditempatkan di dapur, siarannya pun pada malam hari. Namun selanjutnya ketika Belanda menuju sasaran dan menduduki tempat-tempat Republik Indonesia sampai di Gading, Playen dan Wonosari, dengan cepat peralatan radio disembunyikan di WC di kebun dengan ditutupi sampah (Sumarjono, 1984). Rakyat Banaran mengungsi ke Desa Pacar, Paliyan, sedangkan Budiharjo bersama stafnya juga menyelamatkan diri setelah menyelamatkan barang-barang penting lainnya.

Dalam rencana serangan balasan, Komandan Militer Kota, Letnan Kolonel Latif mendapat tugas untuk mengumpulkan pasukan. Pada saat keadaan genting itu, para pemimpin negeri di bawah Presiden Sukarno mengambil langkah bahwa para pemimpin tetap di kota, karena kalau ke

luar kota tentu dikejar musuh. Presiden Soekarno melihat situasi yang berubah dengan cepat itu, kemudian membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi di bawah pimpinan Mr. Syafrudin Prawiranegara, karena keadaan yang sudah tidak mungkin lagi menjalankan tugas yang semestinya. Jika rencana itu gagal, diperintahkan kepada Menteri Keuangan Mr. Maramis yang sedang keluar negeri, Palar dan Dr. Sudarsono di New Delhi supaya membentuk *exile Government Republic Indonesia* di India.

Mandat Presiden dari Yogyakarta kepada Mr.Syafruddin Prawiranegara tersebut menurut Nasution (1979) tidak sampai ke dirinya, namun Mr.Syafruddin mengambil tindakan hanya menurut ilham buat membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera. Bunyinya mandat tersebut demikian:

Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan, bahwa pada hari Minggu tgl.19-12-1948, djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibu Kota Jogjakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjabannya lagi, kami menguasai kepada Mr.Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatera.

Jogjakarta, 19 Desember 1948
Presiden : Soekarno
Wk.Presiden : Moh.Hatta

Perintah untuk membentuk perwakilan RI di India oleh Moh.Hatta dan Agus Salim ditambah demikian:

“...Djika ichtiar Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil kepada saudara-saudara dikuasakan untuk membentuk *exile Government* Republic Indonesia di India. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Sjafrudin di Sumatera. Djika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya...” (Nasution, 1979: 186)

Menanggapi serangan Belanda atas Republik Indonesia di Yogyakarta, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang tengah sakit memerintahkan kepada seeluruh anggota tentara untuk ikut bergerilya menghadapi tentara musuh. Jenderal Sudirman juga membuat perintah harian yang kemudian dibacakan melalui corong radio. Isinya mengutuk perbuatan Belanda yang bertentangan dengan etika, tidak adil, tidak jujur, melakukan kekerasan, padahal bangsa Indonesia sedang berjuang menuntut keadilan, kebenaran, mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan. Sehubungan dengan itu Jenderal Sudirman diharapkan mempunyai tekad bulat bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan untuk menggagalkan maksud keji Belanda yang memaksakan kekuasaannya atas Indonesia (Nasution, 1979: 298). Pada sekitar pukul 13.00 siang setelah dari istana, masih dalam keadaan sakit Jenderal Sudirman meninggalkan kota untuk berjuang bersama dengan para gerilyawan.

Menurut penuturan R.O. Permadipura bekas kepala rumah tangga presiden di Yogyakarta, pada pukul 15.00 Presiden Sukarno keluar dari istana didampingi Tobing yang membawa bendera putih. Keduanya menuju ke arah opsir Belanda yang memanggilnya untuk mengikutinya ke jalan, tepat di depan Kantor Pos bertemu dan berjabat-tangan dengan Komandan Kolonel Van Langen. Saat itu juga radio memberitahukan bahwa Bung Karno telah tertangkap, tertawan. Selanjutnya kembali ke istana bersama-sama, di istana tersebut tertawan juga para pemimpin Republik lainnya (Nasution, 1979: 213).

Pengumuman tentang tertangkapnya Bung Karno tersebut didengar pula oleh KTN di Kaliurang. Pada tanggal 20 Desember 1948 pukul 02.30 dengan mengendarai beberapa jeep Belanda membawa tentara payungnya di Kaliurang. Kedatangannya membawa korban penduduk juga penghinaan pada bangsa Indonesia. Di Kaliurang tersebut Belanda tidak lagi mau menghargai KTN. Belanda yang telah melakukan agresi tersebut mendapat kecaman dunia internasional.

C. Perlawanan Rakyat Semesta

Rakyat Yogyakarta tidak menduga kalau di pagi buta itu akan mendapat serangan mendadak dari Belanda, sehingga kekalutan menimpa semua orang, bahkan serangan tersebut mengakibatkan rakyat menjadi gamang terhadap pemerintah. Selanjutnya dari radio terdengar seruan para pimpinan negeri yang disampaikan oleh Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh.Hatta, Panglima Besar Angkatan Perang RI Jenderal Sudirman, Menteri Negara Sultan Hamengku Buwono IX, yang mengajak segenap rakyat Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Oleh pucuk pimpinan angkatan perang sendiri telah diputuskan bahwa untuk menghadapi Belanda ini rakyat Indonesia harus mengadakan perlawanan gerilya sepanjang masa. Menghadapi Belanda tidak seluruhnya dilawan secara frontal, namun dengan taktik gerilya tak terbatas. Artinya pada masa itu di mana pun Belanda yang menduduki bumi Indonesia harus dilawan. Pada dasarnya perang gerilya adalah perang rakyat semesta. Dibandingkan dengan perang semesta biasa, perang gerilya lebih mendalam dan meluas, menyertakan seluruh komponen rakyat. Gerilyawan membaaur dalam rakyat. Rakyat merupakan sendi, tumpuan, tempat minta bantuan, dukungan bagi gerilyawan.

Berita tentang serangan ibukota oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 itu juga diketahui oleh A.H.Nasution yang pada saat itu pukul 19.00 berada di daerah Prambanan, dalam perjalannya dari Jawa Timur. Dengan cepat A.H. Nasution (Kepala Staf Markas Besar Komando Djawa) membuat *pos komando sementara* bertempat di sebelah utara Prambanan berjarak 5 km, ke arah lereng Gunung Merapi, yaitu di Desa Taskombang, perbatasan antara Yogyakarta-Solo (Nasution, 1979: 4). Langkah ini menurut A.H.Nasution harus segera dilakukan, paling tidak pada malam itu dapat selesai, untuk menentukan lebih lanjut di keesokan harinya. Pada masa perang gerilya itu A.H. Nasution menyiapkan instruksi pokok yaitu Maklumat Pemerintahan Militer untuk seluruh Jawa dan Instruksi Bekerja Pemerintahan Gerilya (Instruksi MBKD I) yang kemudian diteruskan ke seluruh daerah. Di sinilah peran rakyat dan para

pamong desa, kecamatan-kecamatan beserta stafnya, karena perbanyakan pengumuman menggunakan mesin tulis (tik) di tiap kecamatan atau kalurahan (Nasution, 1979: 7).

Pendudukan Belanda atas Kota Yogyakarta harus dilawan, hal itu penting sekali karena untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Akan tetapi tentara dihadapkan dengan masalah yang sangat sulit karena masih dalam keadaan kacau, komunikasi yang macet, namun harus bertindak. Oleh karena itu pemerintah harus mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Langkah tersebut baru dapat dimulai tanggal 20 Desember 1948. Para pasukan yang menyelamatkan diri keluar kota dari serangan Belanda, keberadaan mereka tidak jauh, berpangkal di tepi kota. Setelah berhasil mengkoordinasi pasukan yang memakan waktu lima hari, selanjutnya daerah perlawanan dibagi menjadi Sektor Selatan, Sektor Tenggara, Sektor Barat, Sektor Utara dan Sektor Timur (Kementerian Penerangan, 1953: 385).

Mengenai dua hal yaitu maklumat dan instruksi yang disiapkan oleh Markas Besar Komando Jawa (MBKD) tersebut sangat penting karena negeri dalam keadaan genting, sehingga diambil langkah demikian. Maklumat yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 1948 atau tiga hari setelah agresi Belanda, mengumumkan berlakunya pemerintahan militer di seluruh Jawa. Adapun instruksi yang dikeluarkan MBKD (rahasia) tanggal 25 Desember 1948 yaitu instruksi bekerja pemerintahan militer seluruh Jawa. Isinya mencakup: pendahuluan, perkembangan militer dan politik, susunan dan usaha pemerintahan militer, peringatan: agar supaya menjalankan pemerintahan militer dengan tertib sampai di desa dan kecamatan. Oleh karena desa dan kecamatan sangat penting sebagai dasar pemerintahan militer (Nasution, 1979: 17-25).

Pada masa revolusi tahun 1948-1949, Indonesia menyusun pemerintahan gerilya yang totaliter, pemerintah kelurahan, pemerintahan militer onderdistrik, pemerintah militer kabupaten, pemerintah militer daerah dan keguvernuran militer. Kemudian berturut-turut lurah, Komando Onder Distrik Militer (KODM), Komado Daerah Militer (KDM),

Komando Militer Daerah (KMD) dan Gubernur Militer. Gubernur Militer ini sebagai komandan pertempuran, juga menjadi kepala pemerintahan gerilya yang totaliter dan dibantu rakyat sipil (Nasution, 1980: 19). Pada masa itu, di daerah Yogyakarta organisasi pemerintahannya termasuk tertata. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah Yogyakarta yang sebelumnya memang telah menata demokratisasi di wilayahnya.

Pada tahun 1946 Pemerintah DIY mengeluarkan Maklumat No. 18 tentang dibuatnya Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di DIY (Kasultanan dan Pakualaman). Untuk Daerah Yogyakarta disebut Dewan Daerah bertempat di ibukota Yogyakarta; untuk kota disebut Dewan Kota, berkedudukan di Kota Yogyakarta; di kabupaten disebut Dewan Kabupaten, berkedudukan di ibukota-ibukota kabupaten; serta di kalurahan disebut Dewan Kalurahan, berkedudukan di setiap kalurahan. Maklumat ditandatangani oleh Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, dan Marlan, bunyinya sebagai berikut:

“.....Kami berdua Seri Paduka Ingkang Sinuwun kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka kangdjeng Gusti Pengeran Adipati Arjo paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, dengan persetujuan Badan Pekerdja Dewan daerah Jogjakarta, mengadakan peraturan tentang djalannya kekuasaan mengatur dan memerintah (legislatief dan executief dalam daerah Kami.....” (Kementerian Penerangan, 1953: 62-63)

Selanjutnya pada pertengahan tahun 1947 sebelum Belanda menyerang Yogyakarta, atas usulan-usulan antara lain dari lembaga, kelaskaran, tentara, polisi, maka Pemerintah Daerah Yogyakarta membuat Markas Pertahanan dengan menyatukan tentara, pemerintah dan rakyat di tiap kabupaten/kalurahan, kemantren, ke dalam Dewan Pertahanan Daerah. Pembentukan demikian diharapkan supaya ada kesatuan komando di tiap daerah. Jika putus dengan daerah lain akan dapat menyelesaikannya sendiri. Usulan tersebut direalisasikan pembentukannya mengingat negeri dalam keadaan genting. Pada tanggal 24 Juni 1947 yang ditandatangani

oleh Paku Alam sebagai Ketua Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta, dan diumumkan pada tanggal 27 Juni 1947 oleh Sekretaris Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta, Poerwokoesoemo, terbentuk : Markas Pertahanan Kota, Markas Pertahanan Kabupaten, Markas Pertahanan Kalurahan dan Markas Pertahanan Kemantren. Masing-masing Markas Pertahanan mempunyai bagian-bagian dan terdiri anggota-anggota dari berbagai unsur yang bertanggungjawab pelaksanaannya, misalnya dari ketentaraan, polisi, pemuda, instansi penerangan, sosial, kesehatan rakyat, rumah sakit, wanita, rukun kampung, dewan perwakilan rakyat dan unsur lain yang diperlukan (Kementerian Penerangan, 1953: 74).

Adapun markas-markas pertahanan seluruh daerah Yogyakarta di bawah Pimpinan Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta, yang dalam keadaan genting dipegang Teritorial Komandan Tentara Daerah Yogyakarta. Selanjutnya secara urutan menurut daerahnya masing-masing, Markas Pertahanan Kota memimpin pertahanan di setiap kemantren, kalurahan dalam daerah kekuasaannya. Markas Pertahanan Kabupaten memimpin beberapa Markas Pertahanan Kalurahan di daerahnya. Dalam keadaan genting dipegang oleh komandan tentara di tiap kabupaten yang membawahinya.

Daerah Yogyakarta merupakan daerah pertahanan (Wehrkreise III) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto, pos komandonya berada di daerah pegunungan Menoreh. Pasukan gerilya tanggal 26 Desember 1948 mendapat perintah untuk mengadakan serangan balasan tanggal 29 Desember 1948, ini penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Perintah tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. mengadakan serangan malam.
 2. menghancurkan kekuatan musuh sebanyak-banyaknya.
 3. merampas senjata musuh sebanyak-banyaknya.
 4. membunuh/menghancurkan tempat-tempat yang dianggap penting...
- ”(Nasution, 1979: 77)

Pada hari yang telah ditentukan itu, yaitu tanggal 29 Desember 1948 pukul 18.00 petang, tentara sudah bersiap-siap. Pukul tujuh malam (19.00)

masing-masing bergerak ke sasaran yang ditentukan. Penyerangan dilakukan dari segala jurusan, yang masing-masing dibagi dua bagian kecil dan besar. Bagian kecil bertugas memancing dengan menyerang pos Belanda yang ada di pinggir kota, sedangkan bagian besar bertugas masuk kota melalui celah-celah pos-pos Belanda berada dan menghancurkan mereka yang tengah istirahat. Di samping itu mereka juga bertugas melakukan penghadangan Belanda yang akan ke tepi kota membantu dan memperkuat posnya di tepi-tepi kota. Serangan terhadap Belanda pada pukul 21.00 dengan melepaskan tembakan. Tempat-tempat TNI di kota yaitu di sekitar Kantor Pos, Secodiningratan, Ngabean, Patuk, Pakuningratan, Sentul, Pengok dan Gondokusuman. Tembak-menembak antara TNI dan Belanda berlangsung sampai pukul 04.00 pagi. Pagi itu TNI mundur untuk menghilang dari incaran Belanda. Serangan tersebut mengakibatkan Belanda mengalami banyak kerugian (Kementerian Penerangan, 1953: 387)

Hari-hari setelah agresi, selanjutnya Belanda mengadakan operasi pembersihan terhadap tempat-tempat yang sekiranya diduga persembunyian para gerilya. Mula-mula di dalam kota, kemudian ke pinggiran, luar kota dan mendudukinya yaitu daerah Prambanan, Klaten, Kaliurang, lereng Merapi, Sentolo, daerah Bantul, kabupaten-kabupaten kecuali Wates dan Wonosari. Rakyat melakukan perlawanan dengan cara gerilya. Para gerilyawan menguasai daerah selatan kota dan mempunyai daerah kantong-kantong gerilya. Di daerah tersebut pada siang hari pasukan gerilya melakukan penghadangan-penghadangan terhadap musuh. Untuk merintang jalannya lalu lintas musuh, jembatan Kali Progo juga dirusak. Oleh karena itu setelah tentara Belanda menduduki Sentolo mereka mendapati jembatan sudah rusak (Nasution, 1979: 277-278).

Pembersihan di daerah terus dilakukan oleh Belanda, namun rakyat, para pejuang di daerah-daerah kabupaten sampai di desa-desa mengadakan perlawanan secara gerilya, karena menghindari perlawanan frontal. Di daerah-daerah, Belanda mengadakan provokasi bahwa Republik telah lemah. Namun demikian perlawanan sembunyi-sembunyi tetap ada. Aksi bumihangus misalnya yang dipimpin oleh Bupati Bantul, KRT

Tirtodiningrat. Setelah memindahkan peralatan yang penting, maka pada tanggal 23 Desember 1948 dan hari berikutnya aksi bumihangus dilakukan pada gedung-gedung kabupaten, kapanewon, Kantor Pos/Telepon, pegadaian, gudang garam, sekolah, kantor-kantor pemerintah, hal ini dilakukan supaya tidak dapat dimanfaatkan oleh musuh. Adapun pemerintah kabupaten selalu berpindah, misalnya di Desa Mandingan, mengikuti keadaan, supaya aman. Perlawanan rakyat daerah Bantul selain tentara resmi juga dari kelaskaran, sehingga Belanda mengalami kesulitan. Kemungkinan mendapat perlawanan tersebut, kemudian pada tanggal 19 Januari 1949 daerah Bantul diserang lewat darat maupun udara yang menjatuhkan granat dan mitraliurnya, sehingga banyak korban jatuh terutama daerah Imogiri karena banyak pengungsi yang berlindung di desa tersebut. Daerah yang tidak dilewati Belanda yaitu Srandakan dan Sanden (Kementerian Penerangan, 1953: 107).

Serangan Belanda juga dilakukan di daerah Kulonprogo terutama di daerah-daerah Nanggulan, Kenteng dan Samigaluh. Pada tanggal 27 Desember 1948, Belanda datang menyerang ke Wates, sehingga keadaan menjadi kacau. Arsip-arsip dan barang-barang yang penting milik pemerintahan segera diselamatkan, para pegawainya ke luar kota. Pemerintahan diatur secara siasat gerilya, yang bertanggungjawab yaitu K.R.T. Brotodiningrat Bupati Adikarto dan Komandan KDM. Kedatangan Belanda yang menyerang Wates tersebut menjadikan rakyat, gerilyawan, pejuang mengambil tindakan bumihangus, perusakan terhadap gedung/fasilitas yang kemungkinan dapat digunakan Belanda untuk aktivitas pemerintahannya. Aksi yang dilakukan rakyat tersebut di bawah pimpinan Pamong Praja membuat barikade, penghalang jalan dengan menebangi pohon-pohon. Akan tetapi berhubung sistem pertahanan rakyat belum begitu tertata, maka ketika Belanda untuk yang kedua kalinya mengadakan patroli di Wates pada tanggal 10 Februari 1949, rakyat menjadi panik. Setelah ditinjau kembali, dikoordinasi, disusun kembali penataan keamanannya, maka ketika Belanda mengadakan patroli yang ketiga kalinya mendapat sambutan perlawanan pihak gerilya sehingga membuat tentara musuh

tercerai-berai (Kementerian Penerangan, 1953: 109). Kejadian tersebut dapat menambah kepercayaan rakyat terhadap tentara.

Daerah Yogyakarta termasuk daerah Wehrkreise III di bawah komandan Letkol Suharto. Untuk menunjukkan bahwa TNI masih ada, maka dicarilah akal bagaimana caranya membuka mata dunia internasional bahwa benteng pertahanan negara TNI masih berdiri. Salah satu caranya adalah mengadakan serangan militer dengan spektakuler merebut ibukota Yogyakarta, walau hanya dalam waktu singkat. Letkol Suharto mengerahkan pasukan dari Subwehrkreise yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Mereka yang berjumlah kira-kira 2000 orang nantinya pada tanggal yang ditentukan, 1 Maret 1949 harus berhadapan dengan pasukan Belanda terdiri dari prajurit KNIL (*Koninklijk Nederlands Indies Leger*) yang ada di sektor Yogyakarta di bawah Kolonel van Langen. Sebelum serangan pagi dilancarkan, malam sebelumnya pasukan TNI telah menyusup ke garis awal pinggiran kota, siap tempur. Pada rencana serangan kilat tersebut ada kekeliruan karena di bagian selatan komandannya lupa tanggal itu, sehingga terlanjur mendahului menyerang kota, sehingga ada anggota tentara yang gugur di bawah pohon beringin alun-alun utara. Saat tanda sirine pagi pukul 06.00 berbunyi pada tanggal 1 Maret 1949 serangan pagi oleh TNI dilancarkan dari segala penjuru ke arah kota (Hijboer, 1998: 172). Serangan yang dilancarkan TNI ke arah kota Yogyakarta tersebut sangat mengejutkan van Langen. Dari sisi barat masuk ke arah kota pasukan di bawah pimpinan Suharto sampai di Jalan Malioboro. Dari arah selatan, tentara Republik sampai di alun-alun dan Kantor Pos. Dari timur menuju ke arah kota, pasukan di bawah pimpinan Kapten Rikido yang dapat menguasai pabrik Watson tempat menyimpan amunisi. Siang harinya sekitar pukul 12.00 bantuan Belanda dari arah utara datang, dan TNI mundur setelah enam jam dapat menguasai kota (Hijboer, 1988: 173). Peristiwa serangan tanggal 1 Maret 1949 membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI masih ada.

Keadaan di daerah pada masa revolusi, setelah Belanda melakukan agresi dan menduduki Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Gunungkidul

dirubah menjadi pemerintah militer, sedangkan pusat pemerintahannya berada di Wonosari. Gunungkidul merupakan daerah pegunungan. Terhadap daerah ini Belanda berhati-hati. Sehubungan dengan itu setelah tiga bulan pendudukan, baru tanggal 10 Maret 1949 Belanda mulai mengadakan serangan dengan kekuatan besar melalui udara dan darat ke daerah Gunungkidul dengan menjatuhkan bom, sehingga memakan banyak korban. Akibat serangan tersebut maka Pemerintahan Gunungkidul kocar-kacir, pegawai-pegawainya menyelamatkan diri. Baru setelah diadakan konsolidasi maka pemerintahan sementara berada di Kaligesing. Dibandingkan dengan kekuatan lawan, kekuatan tentara Republik lebih kecil maka diambil kebijakan dengan mundur, tidak mengadakan perlawanan untuk menyusun strategi dan mengatur siasat. Baru pada malam harinya rakyat, pemuda, tentara republik, pasukan polisi negara, membantu tentara mobil dan KODM mengadakan serangan gerilya dengan membuat penghadangan-penghadangan. Selain itu juga mengadakan aksi bumihangus terhadap bangunan-bangunan yang sekiranya dapat dimanfaatkan musuh (Hijboer, 1988: 111).

Sejak agresi bulan Desember 1948 sampai bulan Juni 1949 di daerah Sleman, Belanda menempatkan pos-posnya di Kaliurang, Kledokan, Tempel, Medari, Beran, Cebongan, sedangkan pos yang hanya dijaga pada siang hari yang ada di dekat jembatan Jombor yaitu di Sinduadi, Sendangdadi dan Mlati, sehingga tempat-tempat tersebut sebagai palagan yang ramai. Para pejuang Indonesia bersama-sama Tentara Pelajar (TP) dan para pemuda Militer Akademi (MA) maju melawan Belanda. Di Kaliurang Belanda mempunyai dua gedung yang menjadi pos utama. Gedung bagian barat adalah villa kepunyaan Dr.Sukiman, sedangkan di bagian timur yaitu Villa Argopeni kepunyaan Sri Paku Alam VIII. Dua gedung pos utama Belanda tersebut pada tanggal 11 Maret 1949 dijadikan sasaran serangan gerilya oleh para pemuda MA (Moehkardi, 1993: 242).

Sebagai orang yang bergerak di bidang militer, A.H. Nasution berpendapat bahwa perlawanan terhadap pendudukan Belanda adalah wujud perang rakyat Indonesia yang bergolak di seluruh bidang dan merata

di daerah-daerah. Dapatlah dikatakan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan merupakan pelaksanaan perang rakyat semesta yang menolak penjajahan. Dikatakan demikian karena tidak hanya tentara saja yang berjuang, tetapi rakyat termasuk orang sipil, petani, pamong desa, buruh ikut berperan di dalamnya. Tak dapat dilupakan begitu saja peran rakyat yang ada di kota maupun di daerah pedesaan. Jika di kota berdiri bangunan-bangunan rumah sakit, asrama, dan lain sebagainya, maka tempat tersebut kadang-kadang dimanfaatkan oleh para pejuang gerilya. Pemanfaatan tempat-tempat tersebut dipakai sebagai tempat bersembunyi dengan menyamar agar tidak tampak mencolok di mata musuh. Adapun pedesaan pada masa itu sangat penting untuk keperluan gerak pejuang, karena dapat sebagai tempat berlindung, bersembunyi, bernaung, menyusun rencana menghadapi musuh. Masyarakat pedesaan akan dengan suka rela membantu para gerilyawan dengan caranya sendiri misalnya merelakan tempatnya untuk kegiatan, pos, markas, menyelenggarakan dapur umum, palang merah dan kebutuhan-kebutuhan lain yang menyangkut perjuangan.

Selama pendudukan Belanda di Yogyakarta, banyak korban menimpa rakyat. Sejak tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 30 Juni 1949 kerugian yang diderita rakyat meliputi korban jiwa, menderita luka-luka, orang hilang dan kerugian benda. Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Haminte Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan Adikarto, orang yang meninggal semasa revolusi jumlahnya ada 2718 orang, yang menderita luka-luka 736 orang, yang hilang tidak ditemukan lagi ada 539 orang dan kerugian benda milik rakyat sejumlah Rp 252.684.430,- (Kementerian Penerangan, 1953: 112). Perlawanan dan pengorbanan rakyat daerah Yogyakarta dan sekitarnya tak sia-sia demi untuk mempertahankan tanah tumpah darah, negara dan bangsa.

BAB III

AKTIVITAS A.H. NASUTION DI KEPURUN, KLATEN

A. Kepurun sebagai Markas Gerilya

Kepurun, sebuah nama desa yang terletak di lereng Gunung Merapi mempunyai peranan yang cukup penting pada masa Perang Kemerdekaan II tahun 1948-1949. Desa itu oleh para pejuang dijadikan basis komando perjuangan gerilya di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution.

Secara geografis, Desa Kepurun sangat tepat untuk digunakan sebagai tempat persembunyian para gerilyawan, mengingat letaknya di lereng gunung yang berbukit-bukit. Tempatnya pun cukup tersembunyi dan aman terhadap jangkauan patroli Belanda, meskipun sebenarnya Desa Kepurun tidak terlalu jauh dengan jalan raya yang menghubungkan kota Solo dan Yogyakarta di sebelah selatannya. Namun Desa Kepurun menyimpan potensi pertanian yang dapat diandalkan oleh gerilyawan untuk menjamin pasokan bahan makan.

Nama Kepurun, menurut cerita rakyat yang telah lama berkembang di daerah itu, sangat berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Desa Kepurun telah disebut-sebut sebagai sebuah desa yang lahir lebih dahulu daripada desa-desa disekitarnya. Diceritakan dalam cerita rakyat itu, bahwa ketika Pangeran Diponegoro beserta para prajuritnya melakukan peperangan dengan pasukan Belanda terdesak mundur hingga sampai di sebelah selatan kaki Gunung Merapi. Dalam perjalannya, Pangeran Diponegoro dengan pasukannya itu sempat beristirahat di dekat sebuah *sendang* (mata air).

Untuk menghilangkan rasa lelah dan haus, prajurit Pangeran Diponegoro pun mengambil air *sendang* itu untuk keperluan minum. Setelah para prajurit Pangeran Diponegoro meminum air *sendang* itu,

timbul keanehan pada diri para prajurit, seketika rasa penat hilang dan timbul kembali keberaniannya untuk melakukan peperangan dengan pasukan Belanda. Melihat anak buahnya kembali bersemangat, Pangeran Diponegoro pun berkata :”*Apa gelem nyerang Landa maneh?* (Apakah kamu sekalian bersedia menyerang Belanda kembali?). Para prajurit pun menjawab serentak: ”*Purun!* (Bersedia!). Konon dari kata *purun* itulah kemudian muncul istilah *kepurun* yang selanjutnya dijadikan sebuah nama desa, yakni Desa Kepurun (Muryantoro, 1995: 73).

Secara administratif, Desa Kepurun masuk dalam wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Adapun batas desa meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Bawuhan, Kecamatan Kemalang. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sapen dan Ngeemplak, Kecamatan Manisrenggo. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.⁵

Desa Kepurun yang juga merupakan nama sebuah kelurahan, mempunyai wilayah pedusunan sebanyak empat belas dusun. Adapun nama-nama dusun di Kelurahan Kepurun yakni: Pecokan, Tarub, Kepurun, Baturan, Kepitu, Cingkrikan, Bayen, Kalilumpang, Suruh, Dliring, Dlimosari, Prembe, Jombor, dan Sangean.⁶

Melihat potensi pertanian Desa Kepurun, maka tidaklah mengherankan apabila Kolonel A.H. Nasution memutuskan menjadikan desa itu sebagai tempat untuk markas besarnya. Kolonel A.H. Nasution pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Jawa atau Panglima Tentara dan Teritorium Jawa (PTTD). Markasnya disebut MBKD (Markas Besar Komando Jawa).

Kedudukan MBKD semula berada di ibukota, namun semenjak dikuasainya Yogyakarta oleh pasukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, maka tempat kedudukan MBKD secara rahasia dialihkan ke daerah pedesaan, tepatnya di Desa Kepurun itu.

5 Wawancara dengan Sutarno (Kaur Pemerintahan Desa Kepurun), tanggal 18 Juni 2007.

6 *Ibid.*

Ketika terjadi peristiwa penyerbuan pasukan Belanda, Kolonel A.H. Nasution beserta para staf perwira tengah berada di Jawa Timur. Setelah menerima laporan dari para komandan brigade dan komandan divisi di Jawa Timur tentang adanya serangan Belanda terhadap ibukota Yogyakarta, maka Kolonel A.H. Nasution segera mengambil keputusan untuk kembali ke Yogyakarta. Rombongan Kolonel A.H. Nasution meninggalkan Jawa Timur menuju Yogyakarta menggunakan Kereta Api Luar Biasa (KLB).

Selama dalam perjalanan, di setiap stasiun Kolonel A.H. Nasution mendapat keterangan tentang situasi terakhir ibukota Yogyakarta, yang ternyata telah dapat dikuasai oleh pasukan Belanda. Akhirnya setelah kereta api beberapa kali melakukan kamouflase dan berhenti di tengah perjalanan untuk menghindari tembakan-tembakan dari pesawat Belanda, maka pada jam empat sore sampailah rombongan di Stasiun Srowot, dekat Prambanan (Nasution,1983).



Foto 1: Rumah Lurah Desa Taskombang, Parto Wiryono Dukuh Jumblengan, Kel. Taskombang, Manisrenggo-Klaten

Mayor Sukendro mengusulkan agar semua rombongan turun di Srowot, sebab sudah tidak mungkin lagi melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Dari Srowot rombongan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri jalan raya menuju Prambanan. Setelah jelas bahwa Belanda telah menguasai Yogyakarta, maka Kolonel A.H. Nasution memerintahkan rombongan untuk segera menuju ke arah utara ke lereng Gunung Marapi. Kira-kira jam sepuluh malam rombongan tiba di Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Malam itu rombongan Kolonel A.H. Nasution bermalam di Desa Taskombang, bertempat di rumah Kepala Desa (Lurah) Taskombang, Parto Wiryono.⁷

Walaupun Kolonel A.H. Nasution mengalami kelelahan, namun sebagai panglima perang beliau tetap memikirkan tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk dilakukan. Para anggota stafnya pun turut bersemangat, patuh, dan cukup dedikasinya membantu panglimanya. Maka malam pertama itu telah terfoto tugas-tugas yang menunggu dan telah dilakukan berbagai pembagian tugas antara mereka.

Tanpa membuang waktu, malam itu Panglima Tentara dan Teritorium Jawa (PTTD) Kolonel A.H. Nasution mulai bekerja menulis instruksi-instruksi dengan tulisan tangan. Maka pada tanggal 20 Desember 1948 keluarlah Maklumat MBKD yang pertama: "Berhubung dengan keadaan perang, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 dan No. 70, kami maklumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa" (Nasution, 1953).

Setelah empat atau lima hari MBKD bermarkas di Desa Taskombang, Lurah Kepurun, Parto Wiryono menyarankan agar Pak Guru, panggilan Kolonel A.H. Nasution ketika gerilya, berpindah tempat dari Desa Taskombang menuju ke tempat lain yang lebih aman karena tempat itu terlalu dekat dengan jalan raya Solo-Yogya yang memungkinkan patroli Belanda dapat menjangkaunya. Kolonel A.H. Nasution setuju dengan usul Lurah Taskombang itu. Maka dicarilah tempat untuk markas yang

7 Wawancara dengan Tamzis (Mantan Sekdes Desa Taskombang), tanggal 22 Juni 2007

baru. Akhirnya dengan diantar oleh beberapa pemuda Pager Desa, didapat tempat yang dianggap cocok untuk dijadikan markas gerilya yakni Desa Kepurun.⁸

Proses perpindahan dari Desa Taskombang menuju Desa Kepurun berjalan cukup aman karena dilakukan pada malam hari. Rombongan diterima oleh Lurah Kepurun, Parto Harjono. Dengan demikian, mulai saat itu Panglima Komando Jawa dengan MBKD-nya bermarkas di Desa Kepurun.

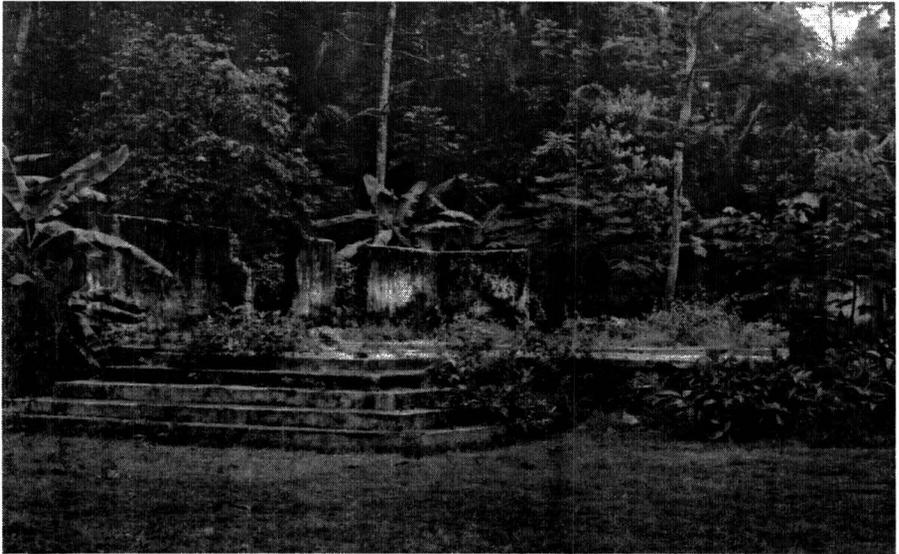


Foto 2: Puing-puing bekas rumah Lurah Desa Kepurun, Parto Harjono Desa Pecokan, Kel. Kepurun, Manisrenggo, Klaten

B. Aktivitas Gerilya A.H. Nasution dan Peran Masyarakat Kepurun

Kolonel A.H. Nasution setelah mendapatkan tempat yang cukup aman di Desa Kepurun untuk markas gerilyanya, maka tugas-tugas MBKD dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan gerilya itu, PTTD beserta stafnya menggunakan nama samaran, agar tidak mudah dikenal oleh pihak Belanda. Nama samaran yang dipakai oleh PTTD yakni Pak Guru,

8 Wawancara dengan Sacran (Mantan *Pager Desa*/Pasukan Gerilya Desa Sapen), tanggal 18 Juni 2007

sedangkan dr. Mustopo (staf kesehatan) menggunakan nama Pak Jenal. Adapun sebutan bagi Letkol dr. Pratigny yakni Pak Kyai. Untuk anggota staf MBKD lainnya, nama-nama samaran yang dipakai, antara lain Pak Banar untuk Mayor Suryo Sumarno, Pak Amat untuk Letkol Suhendro, Pak Mantri untuk Kapten Sumantri, dan Pak Abu untuk Kapten Abu Sadikin (ajudan PTTD).

Nama-nama samaran yang dipakai oleh Kolonel A.H. Nasution beserta stafnya itu sengaja digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Oleh karena itu ketika malam hari Pak Guru, Pak Kyai, dan Pak Jenal yang diikuti Letnan Abu Sadikin sampai di Desa Kepurun, rombongan PTTD dicurigai terutama oleh pemuda-pemuda dari pasukan merah (PKI), disangkanya rombongan itu mata-mata Belanda yang dikirim untuk menyelidiki daerah itu.

Rombongan PTTD sebenarnya diterima baik oleh Lurah Kepurun. Sebab tiga orang pemuda pengantar rombongan, salah seorang diantaranya bernama Saeran merupakan keponakan dari Lurah Kepurun. Pemuda Saeran dan dua orang temannya itu dikenal betul oleh Pak Lurah Kepurun, sehingga Pak Lurah Kepurun pun tidak terlalu curiga dengan kedatangan mereka. Namun ketika para tamu menunjukkan surat keterangannya yang mengaku sebagai penduduk yang berasal dari Desa Taskombang, maka Pak Lurah menjadi curiga. Apalagi Pak Guru tidak bisa berbahasa Jawa, Pak Jenal seperti Belanda, dan Abu Sadikin seperti orang Indo.⁹

Pak Lurah Kepurun yang menjadi curiga dengan identitas mereka, kemudian memberitahu kepada para pemuda supaya mengadakan persiapan menghadapi tamu-tamu yang mencurigakan tersebut. Dalam waktu singkat, rakyat serentak mengepung rumah Pak Lurah Kepurun dengan membawa senjata tajam. Semua pintu, jendela dijaga oleh rakyat dan di kebun halaman penuh pemuda-pemuda meskipun pada waktu turun hujan, penjagaan boleh dikatakan kuat. Kemudian Pak Lurah baru menyatakan kecurigaannya kepada tamu-tamunya. Mula-mula para tamu itu tidak mau mengaku, setelah Pak Lurah menunjukkan persiapan rakyat

9 *Ibid.*

Kepurun yang berada di luar rumah dan sekitarnya, maka para tamu tadi menunjukkan bukti-buktinya, sehingga Pak Lurah hilang rasa curiganya.

Pada saat Pak Lurah menyampaikan pertanyaan tadi, rakyat di luar rumah tidak tahan lagi, bahkan rakyat terus bertambah banyak apalagi di luar masih turun hujan. Rakyat yang sudah berkumpul di rumah Pak Lurah itu mendesak untuk memasuki ruangan tamu, namun belum sampai bertindak terlalu jauh, Pak Lurah segera menemui rakyatnya serta memberi penjelasan bahwa tamu yang dicurigai itu sesungguhnya pemimpin kita sendiri yang menjalankan tugasnya dan sekarang harus dijaga dan membantunya. Menanggapi pernyataan Pak Lurah tersebut, Pak Kyai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Kepurun yang menunjukkan tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi serta semangatnya untuk melawan Belanda. Dengan kejadian tersebut, telah memberi dorongan besar sesuai dengan tujuan Pak guru memilih tempat untuk mengatur dan memimpin Pemerintahan Militer sebagai Panglima Komando Jawa.¹⁰

Pada suatu malam tanggal 23 Desember 1948, di saat hujan lebat Pak Guru, Pak Jenal, Pak Kyai, dan Abu sadikin dengan menggunakan payung yang terbuat dari daun kelapa berangkat kembali ke Desa Taskombang untuk menemui para stafnya yang masih tertinggal di desa itu. Para anggota staf MBKD yang lain itu diminta untuk segera menyusul ke Desa Kepurun guna melakukan konsolidasi lebih lanjut.

Dalam perjalanannya menuju Desa Taskombang, Pak Guru dan stafnya disertai oleh seorang petunjuk jalan Sutarno, pemuda dari Dukuh Tarub, Kelurahan Kepurun. Perjalanan ternyata cukup sulit, mengingat dilaksanakan pada malam hari, di tengah hujan lebat disertai petir serta jalan yang licin, berkubang, sedang jembatan-jembatan telah banyak yang rusak. Walaupun jarak yang dituju hanya kurang lebih sepuluh kilometer, namun terpaksa ditempuh dalam waktu kurang lebih lima jam. Perjalanan yang dilakukan pada malam hari itu bagi Pak Guru dengan stafnya dan pemuda Sutarno cukup mengesankan, sebab dari tempat mereka berdiri masih terlihat api yang menyala akibat aksi bumi hangus di pabrik penggilingan

10 *Ibid.*

padi Klewer, Manisrenggo. Setelah berjalan selama lima jam, akhirnya jam 01.30 dini hari Pak Guru dengan stafnya dan pemuda Sutarno sampai di Desa Taskombang.¹¹

Keesokan harinya, Pak Guru, Pak Jenal, pak Kyai, dan Abu sadikin telah tiba kembali di Desa Kepurun. Mereka meminta kepada Pak Lurah Kepurun agar mencarikan orang yang dapat dipercaya untuk membantu menjalankan tugas-tugas MBKD. Pak Lurah kemudian mengajukan nama Sutarno (Tarno Atmojo). Pak Guru pun setuju dengan nama yang disodorkan oleh Pak Lurah itu, maka jadilah Sutarno secara resmi diangkat sebagai staf MBKD. Adapun pelantikan Sutarno dilaksanakan di bawah sumpah pada tanggal 24 Desember 1948 di hadapan Pak Guru dan disaksikan oleh Lurah Desa Kepurun.

Dalam staf MBKD tersebut, pemuda Sutarno diberi beban tugas, antara lain:

1. Menjaga keselamatan PTTD beserta stafnya.
2. Mencarikan tempat-tempat PTTD guna menjalankan tugasnya yang bersifat rahasia.
3. Menerima tamu-tamu yang hendak menemui PTTD, terbatas pada perwira-perwira saja.¹²

Mengingat pemuda Sutarno berdomisili di Dukuh Tarub, maka guna memperlancar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya serta untuk mempermudah komunikasi dengan staf MBKD, Pak Guru dan stafnya pun pindah ke Dukuh Tarub.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*



Foto 3: Rumah Bayan Tarub, Tarno Atmojo Dk. Tarub, Kel. Kepurun, Manisrenggo, Klaten (Nasution, 1994)



Foto 4: Rumah Bayan Tarub, Tarno Atmojo Dukuh Tarub, Kel. Kepurun, Manisrenggo, Klaten (Foto Th. 2007)

Setelah staf MBKD berkedudukan di Dukuh Tarub, pada tanggal 26 Desember 1948 dilaksanakan sidang perwira untuk pembagian tugas. Pak Kyai (Letnan Kolonel dr. Pratiknyo) dan Pak Banar (Mayor Suryo Sumarno) diperintahkan untuk ke Semarang mengemban misi rahasia. Mereka berangkat pada tanggal 29 Desember 1948, tetapi karena sesuatu hal terpaksa kembali lagi. Baru pada tanggal 31 Desember 1948, Pak Kyai dan Pak Banar kembali melanjutkan tugasnya. Perjalanan menuju Semarang melewati Desa Bono, Kecamatan Kemalang dan mereka pun bermalam di desa itu.

Esok paginya, tanggal 1 Januari 1949 mereka melanjutkan perjalanan dan masuk daerah Boyolali. Sesampainya di Kelurahan Jemowo Pak Kyai dan Pak Banar ditangkap oleh rakyat dan dituduh mata-mata Belanda. Karena kesalahfahaman itu, terjadilah penyiksaan-penyiksaan terhadap dua orang staf MBKD itu hingga meninggal dunia. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Desa Trutus, Kelurahan Jemowo. Oleh masyarakat setempat kedua jenazah itu kemudian dimakamkan di pemakaman desa.



Foto 5: Rumah Prawiro Harjono Dukuh Baturan, Kel. Kepurun, Manisrenggo, Klaten

Pada tanggal 2 Januari 1949, kedudukan MBKD pindah ke Dukuh Baturan di rumah Nargosuparjo (Prawiro Harjono). Tujuan perpindahan itu adalah agar kerahasiaan MBKD tetap terjaga, tidak terkonsentrasi pada satu tempat saja. Apabila MBKD berkedudukan pada satu tempat saja dalam tempo yang lama, maka akan mudah diketahui oleh musuh.

Pada tanggal 3 Januari 1949, Sutarno melaporkan kepada PTTD tentang terbunuhnya dua orang perwira staf MBKD yakni Pak Kyai dan Pak Banar. Pada saat itu bersamaan dengan kedatangan Mayor Sakri menghadap Pak Guru. Oleh Pak Guru diputuskan agar Kapten Amijoyo menyelesaikan kasus terbunuhnya Pak Kyai dan Pak Banar itu. Oleh Kapten Amijoyo makam kedua pahlawan itu diberi nama Kyai Tumbal Negara.

Sementara itu, berhubung ajudan yang sehari-hari mengikuti Pak Guru yakni Abu Sadikin seorang dari Bandung yang tidak bisa berbahasa Jawa, maka beliau diganti oleh Kapten Suranto. Abu Sadikin kemudian dipindahkan ke staf.

Pada minggu pertama Januari 1949, tempat kedudukan MBKD berpindah lagi, namun tetap di Dukuh Baturan yakni di rumah Warno Atmojo. Selanjutnya pertengahan Januari 1949 kedudukan MBKD kembali lagi ke Dukuh Tarub di rumah Sutarno. Baru beberapa hari staf MBKD menempati rumah Sutarno, ternyata di tempat itu dirasakan telah banyak terjadi perubahan suasana, di samping kurang menguntungkan karena berada di tepi jalan, juga di tempat itu banyak terdapat pengungsi. Oleh karena itu Sutarno dan Kapten Sukendro mencarikan tempat yang baru, yakni di Dukuh Sapen, Kelurahan Sapen di rumah Yoso Sumarto.

Di Desa Sapen, markas MBKD ternyata sangat dekat dengan kedudukan Belanda yang bermarkas di Gondangwinangun atau di Mipitan, Klaten yang jaraknya kurang lebih lima kilometer dari Sapen. Dari Mipitan itu Belanda sering mengadakan patroli sampai di dekat desa yang ditempati Pak Guru. Oleh karena itu untuk menghindari patroli Belanda, pada suatu malam Pak Guru pergi meninggalkan tempat dan masuk ke rumah seorang janda melarat. Pak Guru terpaksa bermalam di tempat itu.



Foto 6: Rumah Lurah Desa Sapen, Yoso Sumarto Dukuh Sapen, Kel. Sapen, Manisrenggo, Klaten



Foto 7: Rumah Bayan Kepurun, Sangadi Ronodimejo Dukuh Sanggean, Kel. Kepurun, Manisrenggo, Klaten

Sehubungan seringnya patroli Belanda mendekati Desa Sapen, maka markas MBKD yang berkedudukan di tempat itu dirasakan kurang aman. Oleh karena itu, agar keselamatan dan kerahasiaan tetap terjaga, maka markas MBKD berpindah lagi ke Dukuh Sanggean (Kelurahan Kepurun), bertempat di rumah Ronodimejo.

Di Dukuh Sanggean keadaannya tenang dan sunyi, sehingga staf MBKD dapat bekerja dengan tenang dan aman pula. Namun tempat itu juga dekat dengan markas Belanda yang berada di jalan antara Pakem-Kaliurang, jaraknya tidak lebih dari lima kilometer. Oleh karena markas MBKD kedudukannya tidak begitu jauh dengan markas Belanda, maka patroli Belanda pun sering terlihat mendekati daerah itu. Namun patroli Belanda tidak berhasil menemukan markas MBKD, hal itu disebabkan sifat rahasia yang dapat terjaga dengan sangat baik dan rapi.

Pada bulan Februari 1949, patroli Belanda mengadakan pembersihan dan operasi besar-besaran di sekitar Dukuh Sanggean. Patroli Belanda terdiri dari banyak pasukan, mereka diperkirakan datang dari Gondang, Prambanan, Kalasan, Pakem, ataupun Kaliurang. Dengan membabi buta, patroli Belanda membakar rumah-rumah penduduk yang tidak mau menunjukkan keberadaan markas MBKD. Dalam kondisi yang cukup kritis itu, Pak Guru terpaksa harus meninggalkan Sanggean untuk mengungsi. Ketika Pak Guru meninggalkan Sanggean terpaksa berpisah dengan para pengawalinya. Pak Guru baru bertemu dengan ajudannya, Kapten Suratno pada sore hari di rumah Yoso Sumarto di Sapen.

Setelah patroli Belanda keluar dari Sanggean, Pak Guru beserta stafnya kembali lagi ke markasnya di Dukuh Sanggean. Di tempat itu Pak Guru dan stafnya bermarkas cukup lama. Banyak tamu yang menghadap Pak Guru, antara lain Letkol Suharto dari Yogyakarta, Kolonel Jatikusumo, Kapten Sudomo dari bagian perlengkapan MBKD, dan sebagainya. Dari Dukuh Sanggean itu pula, Pak Guru kemudian merekrut dua orang pemuda untuk melayani keperluan sehari-hari, yaitu Sumardi dan Sunardi. Kedua orang itulah yang dipercaya oleh Pak Guru untuk menjadi kurir mengirimkan surat-surat penting ke pos-pos MBKD yang telah dibentuk. Pemuda

Sumardi juga berhasil memperoleh dinamo sepeda dari Joyodiharjo untuk dimanfaatkan sebagai penggerak yang dapat menerima siaran radio.

Aktivitas Kolonel A.H. Nasution dengan staf MBKDnya di Kepurun berjalan kurang lebih selama tiga bulan. Setelah menghasilkan banyak keputusan penting selama di Kepurun, maka sehubungan dengan perkembangan politik, markas MBKD kemudian dipindahkan ke daerah Kulonprogo, tepatnya di Desa Borogunung, Kelurahan Banjarasri, Kecamatan Boro, Kulonprogo.

BAB IV

AKTIVITAS GERILYA

A.H. NASUTION DI BORO, KULONPROGO

A. Boro sebagai Markas Gerilya

Pos Markas Besar Komando Jawa (MBKD) yang berada di Desa Kepurun, Kecamatan Manisrenggo, Klaten dianggap tidak aman lagi, maka Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa (PTTD) memutuskan untuk segera memindahkan Markas MBKD ke tempat yang aman. Kemudian Kolonel A.H. Nasution beserta staf mencari tempat yang aman dengan melalui desa-desa sebelah utara Yogyakarta seperti Glagaharjo, Pakembinangun, Candibinangun, Tempel terus bergerak ke arah barat akhirnya sampai di Desa Bligo, daerah Ngluwar, Muntilan. Dari Desa Bligo, Kolonel A.H. Nasution diantar Yantuni ke Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kulonprogo mencari tempat yang aman sebagai markas MBKD.¹³

Kehadiran Kolonel A.H. Nasution bersama stafnya di Kelurahan Banjarasri tidak menjadi perhatian masyarakat. Hal itu disebabkan kehadirannya bersamaan dengan masyarakat pengungsi lainnya yang mencari tempat perlindungan di desa itu. Seperti kebiasaan pada saat itu, Kolonel A.H. Nasution datang ke Kantor Kalurahan Banjarasri menggunakan nama samaran Abdul Haris dan mengaku sebagai guru yang berasal dari Sumatera yang mengungsi karena tidak bisa pulang ke Sumatera. Pengakuan Kolonel A.H. Nasution sebagai seorang guru

13 Wawancara dengan Suryono dan Suryati, tanggal 4 September 2007



Foto 8: Rumah Lurah Desa Banjarasri, Sastro Wiharjo Dukuh Borogunung, Kel. Banjarasri, Kec. Kalibawang, Kulonprogo

merupakan bentuk penyamaran sebagai taktik mengelabui masyarakat demi keamanan.

Sesuai dengan taktik yang dilakukan oleh Kolonel A.H. Nasution bahwa ia seorang pengungsi, maka pada hari pertama beliau memilih tinggal di rumah Martowiharjo, seorang guru di Boro. Pak Nas hanya tinggal satu hari di rumah Martowiharjo, kemudian Kolonel A.H. Nasution pindah ke rumah Kartosentiko di Depok. Di rumah Kartosentiko itu pun, Kolonel A.H. Nasution hanya tinggal satu hari. Kolonel A.H. Nasution berikutnya pindah ke rumah Kartodikromo di Nglebeng. Di rumah Kartodikromo itu Kolonel A.H. Nasution lagi-lagi hanya tinggal satu hari.

Seringnya Kolonel A.H. Nasution berpindah tempat tinggal, disebabkan Pak Nas belum menemukan tempat yang aman untuk mendirikan Pos MBKD. Kesulitan mencari tempat yang aman untuk Pos MBKD akhirnya dapat diatasi setelah para pengawalinya menemukan suatu tempat yang dianggap aman dan disetujui oleh Kolonel A.H. Nasution, yakni di rumah Pak Nitirejo (Hardjowidjono, 1987: 217).



Foto 9: Rumah Pak Nitirejo (Foto Th. 1949) Dk. Borogunung, Kel. Banjarasri, Kalibawang, Kulonprogo



Foto 10: Rumah Pak Nitirejo (Foto Th. 2007) Dk. Borogunung, Kel. Banjarasri, Kalibawang, Kulonprogo

Pada saat itu ± pukul 17.00 Yantuni dan Subargo menemui Pak Nitirejo meminta izin agar gurunya, Kolonel A.H. Nasution diperbolehkan tinggal di rumahnya. Mula-mula permintaan Yantuni dan Subargo ditolak oleh Pak Nitirejo, karena merasa dirinya miskin dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup tamunya dan rumahnya jelek. Setelah dijelaskan oleh Yantuni dan Subargo bahwa masalah kebutuhan hidup gurunya, tidak usah terlalu dipikirkan oleh Pak Nitirejo karena sudah ada yang menanggung, demikian juga mengenai rumah yang jelek tidak menjadi masalah. Dengan adanya penjelasan tersebut akhirnya Nitirejo bersedia menerima Kolonel A.H. Nasution.

Kira-kira pukul 19.00. Kolonel A.H. Nasution dengan diantar Yantuni, Subargo, Suranto, dan Mahful tiba di rumah Pak Nitirejo. Sejak saat itu rumah Pak Nitirejo menjadi tempat tinggal Kolonel A.H. Nasution dan Pos MBKD.¹⁴

Pos MBKD yang terletak di Pedukihan Borogunung itu merupakan tempat perbatasan daerah operasi pasukan Belanda dari Brigade van Lagen dan Brigade van Zanten di lereng pegunungan Menoreh. Brigade van Lagen berkedudukan di Yogyakarta sedangkan Brigade van Zanten berkedudukan di Magelang. Setelah Pos MBKD berkedudukan di Borogunung keadaannya lebih aman daripada sewaktu berada di Kepurun (Notosusanto, 1973: 35, 38).

Rumah Pak Nitirejo terletak di Pedukuhan Borogunung, Kelurahan Banjarasri kawasan perbukitan Menoreh yang cukup sulit dicapai. Tempat itu letaknya terlindung dalam suatu lekukan jurang. Bertolak dari keadaan itulah, maka Kolonel A.H. Nasution menjadikan rumah Pak Nitirejo sebagai Pos MBKD. Di tempat itu pula Kolonel A.H. Nasution beserta stafnya setiap hari bisa melihat dengan jelas suasana daerah yang berada jauh di timur, selatan dan barat Banjarasri.. Keadaan itu didukung lagi dengan letak kawasan yang dibatasi oleh aliran Kali Progo, sehingga daerah itu semakin terlindung dari ancaman musuh yang ada di sebelah timur.

14 Wawancara dengan Ny. Nitirejo, tanggal 4 September 2007.



Foto 11: Bukit Menoreh (Foto tahun 1949) (Nasution, 1994)



Foto 12: Bukit Menoreh (Foto Tahun 2007)

Di halaman rumah Pak Nitirejo terdapat hamparan batu gunung yang ideal untuk beristirahat dan melihat keadaan di sekitarnya. Pandangan itu lebih luas lagi, jika Kolonel A.H. Nasution naik ke arah utara menuju suatu daerah perbukitan yang lebih tinggi. Keadaan seperti itu sangat mendukung keamanan kerja Kolonel A.H. Nasution. Selain daerah itu sulit dicapai, juga mudah mendeteksi kedatangan musuh. Oleh karena itu, Kolonel A.H. Nasution sering menggunakan bagian depan rumah Pak Nitirejo pada siang maupun malam hari. Apabila Pak Nas naik ke arah utara hanya pada waktu siang hari, karena kalau malam hari medannya sulit di jangkau, karena jalannya naik turun bukit dan gelap.



Foto 13: Pemandangan yang dilihat dari Bukit Menoreh

Dengan penempatan Pos MBKD yang dikenal dengan nama X-2 di rumah Pak Nitirejo, Borogunung, Banjarasri itu, maka Kolonel A.H. Nasution dapat meneruskan kegiatannya, terutama mengirim perintah atau berita kepada berbagai Pos MBKD dan para pejuang Republik Indonesia lainnya yang sedang berjuang melawan tentara Belanda. Salah satu hubungan itu adalah dengan Pos X MBKD di Kota Yogyakarta yang

dipimpin oleh Laoh dan Ny. Nasution. Mereka mengatur hubungan surat menyurat antara Kolonel A.H. Nasution dengan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Drs. Moh Hatta yang berada di pengasingan. Kelancaran hubungan tersebut berkat kebijaksanaan pimpinan Pos MBKD Yogyakarta yang dapat memanfaatkan pesawat terbang milik *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (Hardjowidjono, 1987: 217)

Dengan posisinya di Borogunung, posisi gerilya PTTD dan Pos MBKD lebih aman disbanding dengan ketika berada di kepurun. Lokasi Borogunung yang berada di atas bukit dan memiliki ruang pandang yang luas menjadikan A.H. nasution dapat melihat posisi musuh dari tempat yang tersembunyi. Di samping itu daerah Borogunung juga berada di perbatasan antara daerah operasi Brigade van langen dan Brigade van Zanten yang berpusat di Magelang.

Kelurahan Banjarasri merupakan salah satu wilayah Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo dengan luas wilayah 1.141,9195 hektar. Menurut peta tahun 1934, daerah Banjarasri yang ada sekarang ini terdiri dari 23 desa yaitu Boro, Borosuci, Borowetan, Borogunung, Jurang, Pancuran, Kali Jeruk, Gejlik, Jetis, Nlebung, Ngaren, Sinongko, Kagok, Tlangu, Kepikan, Paras, Ngendak, Jurungan, Tirip, Bentulu, Geblag, Ngroto dan Tuksongo. Sebelum kemerdekaan, Boro merupakan kelurahan tersendiri yang meliputi Boro, Borogunung, Kalijeruk, Jurang, Kembang, Borowetan, Borosuci, Kagok, Gejlik dan Jetis. Kemudian pada tahun 1947 seiring dengan adanya penataan desa-desa bekas kasultanan, Kelurahan Boro bergabung dengan Kelurahan Paras menjadi Kelurahan Banjarasri (Hardjowidjono, 1987: 213; Tashadi, 1982: 127-128).

Penduduk Desa Banjarasri sebagian besar hidup dari pertanian. Sejak awal abad XX, Desa Banjarasri banyak dipengaruhi oleh kegiatan para missionaris Katolik. Kedatangan mereka di Banjarasri mempercepat perkembangan agama Katolik, kesehatan dan pendidikan (Hardjowidjono, 1987: 213; Tashadi, 1982: 127-128).

Desa-desa di daerah Yogyakarta termasuk daerah yang paling teratur bagi suatu pertahanan rakyat. Berkat kegiatan Sultan Hamengku

Buwono IX di daerah Yogyakarta telah terjadi proses demokratisasi, yang memungkinkan dapat menyalurkan dan mengerahkan tenaga massa. Desa-desanya telah digabungkan sehingga menjadi cukup besar untuk berdiri sendiri-sendiri. Di tiap desa sudah ada perangkat desa seperti lurah, kamituwa, carik dan sebagainya yang mempermudah pemerintahan gerilya. Seperti desa lainnya pada waktu itu, Kelurahan Banjarasri juga sudah teratur untuk menjadi pendukung perjuangan. Kondisi itu mempermudah pembentukan pemerintah gerilya. Hal itu disebabkan telah tersedia susunan perangkat desa untuk melaksanakan pemerintahan yang otonom. Pemerintahan desa dapat menopang urusan pengungsi, pertahanan sipil, perbekalan, penerangan dan sebagainya. Instansi desa mampu dengan kekuatan sendiri menyesuaikan pekerjaannya menurut kebutuhan perang gerilya dan langsung menjadi dasar pemerintahan gerilya (Nasution, 1979: 34).

Perlu diketahui bahwa secara ekonomis lurah beserta pembantunya merupakan orang-orang yang terpandang dalam masyarakat. Dengan memegang jabatan lurah atau perangkat lainnya seseorang akan dihormati oleh masyarakat. Hal itu disebabkan secara ekonomis mereka termasuk kuat, karena mempunyai tanah garapan yang cukup luas. Tanah itu kecuali milik sendiri juga tanah yang disebut *bengkok* atau tanah *pelungguh* sebagai gaji selama menjabat pamong desa. Sehingga dengan keadaan sosial ekonomi yang demikian itu pamong desa mampu mendukung perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan.

Sehubungan dengan perkembangan tersebut maka Lurah Desa Banjarasri, Sastrowiharjo karena telah lanjut usianya menugaskan carik desa untuk membentuk *Pager Desa*. Adapun *Pager Desa* ini terdiri para pemuda desa yang bertugas menjaga keamanan, membantu tugas sosial desa, menjadi kurir dan sebagainya. Dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan wilayah, maka setiap anggota *Pager Desa* bertugas dengan aktif untuk mengamati setiap orang yang keluar masuk wilayah Banjarasri. Sehingga kemungkinan akan terjadi kebocoran rahasia ataupun masuknya mata-mata musuh bersama arus pengungsi dapat dicegah.

Rumah Lurah Sastrowiharjo saat itu kecuali sebagai kantor kelurahan juga dijadikan tempat penghubung dengan berbagai pihak, sehingga selain menjalankan pemerintahan sipil, kelurahan juga membantu usaha para tentara. Rumah Lurah Sastrowiharjo juga dipergunakan untuk mengkoordinasi hubungan antarpengungsi, pemberian bantuan makanan kepada para anggota tentara yang melalui daerah tersebut (Hardjowidjono, 1987: 214).

Pada masa revolusi suatu pemerintahan kabupaten merupakan sebuah pemerintahan gerilya. Hal ini disebabkan dalam menjalankan roda pemerintahannya, bupati dan stafnya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang dipandang aman untuk selalu dapat menjalin hubungan ke bawah dengan camat, lurah dan kepala dukuh. Pemerintah kabupaten didampingi pemerintahan militer yang dinamakan Komando Distrik Militer (KDM). Di tingkat kecamatan juga pemerintahan militer yang dinamakan Komando Onderdistrik Militer (KODM). Pemerintahan kelurahan dilaksanakan oleh lurah dibantu pamong desa dan *pager desa*. Pejabat dari tingkat bupati sampai kepala dukuh merupakan kelompok inti dalam perang gerilya. Dalam pelapisan masyarakat mereka termasuk berada pada tingkat atas. Dengan adanya pola sistem pemerintahan tersebut maka di Banjarasri dilaksanakan dengan baik (Tashadi, 1992: 137; Haji, 2004: 77).

Sejak Belanda melancarkan Agresi Militer II dengan disertai gerakan pembersihan ke daerah yang dianggap sebagai tempat persembunyian TNI, maka Desa Banjarasri banyak didatangi penduduk dari luar untuk mengungsi. Para pengungsi tersebut terdiri penduduk sipil dan militer yang mencari tempat berlindung terutama pada siang hari. Para pengungsi yang berada di Desa Banjarasri tidak dapat ditentukan secara pasti, karena para pengungsi datang secara tidak teratur. Jumlah pengungsi penduduk sipil di Banjarasri lebih banyak dibandingkan jumlah pengungsi militer. Hal itu disebabkan para anggota TNI hanya menggunakan Banjarasri sebagai daerah lintasan. Para anggota TNI yang tinggal di Banjarasri jumlahnya tidak banyak dan mereka tinggal di Jetis dan Borogunung.

Para pengungsi mendapat pelayanan yang baik oleh penduduk Banjarasri. Bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa akan ditampung oleh penduduk setempat baik tempat maupun makannya. Pada saat itu kegotong-royongan sangat tampak sekali. Keadaan semacam ini tumbuh semakin meningkat antar pihak TNI, penduduk serta pengungsi (Hardjowidjono, 1987: 214-215).

Sudah dijelaskan, bahwa Kolonel A.H. Nasution tinggal di rumah Pak Nitirejo dan menjadikan rumah Pak Nitirejo sebagai Pos MBKD. Sejak Kolonel A.H. Nasution tinggal di rumah Pak Nitirejo, keberadaannya dirahasiakan, setiap orang tidak diperbolehkan menemuinya. Oleh karena itu hubungan Kolonel A.H. Nasution dengan penduduk setempat terbatas sekali. Kolonel A.H. Nasution lebih sering berada di dalam kamar untuk menyusun strategi dan menulis perintah. Kolonel A. H. Nasution baru tidur setelah pukul 02.00 dinihari. Surat perintah dan rencana strategi untuk berbagai Pos MBKD disampaikan secara beranting dari Borogunung melalui Jetis ke Ngipik, Samigaluh dan sebagainya. Surat perintah tersebut dibawa oleh Atmomun dan didampingi oleh seorang tentara. Kolonel A.H. Nasution dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sukardi dan Sastroatmojo.

Penduduk yang ingin berkunjung ke rumah Pak Nitirejo harus memberikan tanda-tanda tertentu yaitu berupa siulan yang sudah harus dilakukan sejak dari kejauhan. Kebutuhan makanan lebih sering didatangkan dari Yogyakarta, sehingga setelah sampai di rumah Pak Nitirejo tinggal memanaskan atau memasak bahan yang sudah disediakan dari Yogyakarta. Apabila tidak ada kiriman makanan dari Yogyakarta, maka Ny. Nitirejo dengan dibantu penduduk setempat menyediakan makan untuk Kolonel A.H. Nasution. Makanan yang disajikan adalah nasi dengan lauk sayur *gori* dan tempe atau tahu (Hardjowidjono, 1987: 217).¹⁵

Tidak mudah para tamu dari luar desa yang ingin bertemu dengan Kolonel A.H. Nasution. Orang yang ingin bertemu dengan Kolonel A.H. Nasution biasanya datang terlebih dahulu harus melapor ke pos

15 Wawancara dengan Ny. Nitirejo dan Suryono, tanggal 4 September 2007.

penghubung di kantor kelurahan. Orang tersebut tidak akan di bawa langsung bertemu Kolonel A.H. Nasution. Setelah menunjukkan identitas dan maksud kunjungannya, para pemuda yang menjadi penghubung memberitahukannya kepada para penghubung tentara yang ada di rumah Karyoikromo di Jetis. Pada waktu berangkat ke Jetis yang menjadi pusat penghubung tentara, para pemuda melalui jalan yang berlawanan untuk mencapai tujuan. Dari Jetis penghubung tentara yang ditugaskan menemui Kolonel A.H. Nasution di rumah Pak Nitirejo melaporkan kalau ada orang yang ingin bertemu. Apabila Kolonel A.H. Nasution mengizinkan, maka penghubung tentara dari Jetis akan membawa orang tersebut bertemu dengannya. Ini semua dilakukan demi menjaga keamanan (Hardjowidjono, 1987: 218). Dengan sistem keamanan yang demikian itu, sangat mendukung kelancaran mekanisasi kerja Pos MBKD.

Sebuah perang gerilya, salah satu syarat pokok yang penting adalah adanya rakyat yang membantu. Dalam perang gerilya, rakyat harus kuat batinnya, kuat ideologinya, kuat semangat perjuangannya, kuat kemerdekaannya, dan tabah menderita dalam perjuangan (Muryantoro, 1995/1996: 101). Sikap yang demikian itu telah ditunjukkan oleh penduduk Banjarasri. Penduduk selalu siap membantu TNI seperti membantu mengadakan pengawasan, menjadi kurir, menyediakan rumahnya untuk tempat tinggal para pengungsi, menjaga rahasia dan sebagainya.

Bantuan penduduk dan pamong Desa Banjarasri telah berhasil mengamankan Pos MBKD yang berada di Borogunung, Kelurahan Banjarasri. Kecuali itu, penyediaan makanan yang dilakukan rakyat Banjarasri merupakan salah satu faktor yang sangat berarti bagi keberhasilan Pos MBKD di Banjarasri. Rakyat Banjarasri mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keberadaan Pos MBKD. Mereka selalu menjaga para personel MBKD. Informasi-informasi penting khususnya keamanan selalu mereka berikan. Rakyat sanggup merahasiakan keberadaan MBKD dan Kolonel A. H. Nasution

Kelurahan Bajarasri juga mempunyai peranan penting bagi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebagai

akibat didudukinya Yogyakarta oleh tentara Belanda, Jaksa Agung Tirtowinoto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Besar Polisi Sosrodanukusumo mengungsi ke Kelurahan Banjarasri. Kemudian Tirtowinoto mendirikan Pos Kejaksaan Agung dalam pengungsian, demikian juga Komisaris Besar Polisi Sosrodanukusumo membentuk Pos Kepolisian dalam pengungsian di daerah Banjarasri. Usaha ini dilakukan dalam rangka melanjutkan mekanisme suatu pemerintahan negara meskipun dalam pengungsian.

Tirtowinoto dan Komisaris Besar Polisi Sosrodanukusumo bersama-sama menempati bagian depan rumah Pawirosuwarno di Dukuh Tlangu, Banjarasri. Di rumah Pawirosuwarno itu Tirtowinoto bersama keluarganya, sedangkan Komisaris Besar Polisi Sosrodanukusumo hanya diikuti oleh seorang pembantu dan seorang ajudan. Mereka hidup meniru penduduk setempat sebagai upaya menyesuaikan diri dan untuk menghindari kecurigaan mata-mata musuh. Di pengungsian para pejabat tinggi negara itu mengerjakan sendiri pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci dan sebagainya. Mengenai bahan pangan, sebagian mereka peroleh dari penduduk setempat dan sebagian lagi mereka beli dari penduduk. Keamanan kedua pejabat tinggi negara itu hanya dipercayakan kepada petugas keamanan desa atau *pager desa*. Mereka tidak mempunyai pengawal khusus kecuali seorang ajudan yang dibawa Komisaris Besar Polisi Sosrodanukusumo. Tirtowinoto dan Komisaris Besar Polisi Sosrodanukusumo sering menerima tamu. Biasanya para tamu datang dengan cara menyamar seperti penduduk desa. Pertemuan dan pembicaraan juga dilakukan di rumah Pawirosuwarno. Pada waktu mendengar berita bahwa tentara Belanda akan menyeberang Kali Progo, kedua pejabat tinggi negara itu meninggalkan Tlangu menuju ke Semagung. Akan tetapi di Semagung, Tirtowinoto dan Komisaris Besar Polisi Sosrodanukusumo tidak lama. Hal itu disebabkan tentara Belanda gagal dalam usahanya menyeberangi Kali Progo. Mereka kemudian kembali lagi ke rumah Pawirosuwarno di Tlangu.

Dengan adanya pejabat penting Pemerintah Republik Indonesia yang berada di Banjarasri mengharuskan para pemudanya lebih berhati-

hati dalam menjaga dan meningkatkan tugas keamanan desa. Keamanan tersebut lebih diperkuat lagi karena di Banjarasri sering dilaksanakan pertemuan antara pejabat tinggi. Pejabat dari Angkatan Darat, Kepolisian, Kejaksaan Agung selama berada di pengungsian telah beberapa kali bertemu untuk membicarakan berbagai masalah yang muncul dalam masa perjuangan (Hardjowidjono, 1987: 216; Tashadi, 1992: 130).

Demikianlah peranan Desa Banjarasri pada masa Agresi Militer Belanda II dimana penduduknya mampu berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Keadaan alam Desa Banjarasri yang strategis karena daerahnya terletak di kawasan perbukitan yang terjal merupakan tempat yang ideal untuk berlindung. Demikian juga adanya pemerintahan desa yang baik merupakan modal yang sangat penting untuk mendukung peranan Desa Banjarasri sebagai tempat pengungsian penduduk sipil, para pejabat tinggi sipil maupun militer. Dengan demikian keamanan dan pelayanan sosial terhadap para pengungsi dan pejuang dapat dipenuhi. Jadi salah, jika ada anggapan bahwa rakyat desa dipandang kecil, yang jelas mereka telah memberikan segalanya untuk mempertahankan kemerdekaan.

B. Aktivitas Gerilya A.H. Nasution dan Peran Masyarakat Boro

Pos Markas Besar Komando Djawa (MBKD) pada mulanya ditempatkan di seputar lereng Gunung Merapi. Namun karena berbagai serangan terus menerus yang dilancarkan oleh Belanda, maka Kolonel A.H. Nasution beserta stafnya berinisiatif mencari tempat yang sekiranya dipandang lebih aman untuk menjalankan tugas operasionalnya. Dengan pertimbangan tersebut akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan markas komando. Pada mulanya mereka menelusuri desa-desa yang berada di sebelah utara Kota Yogyakarta, kemudian bergerak ke arah barat. Akhirnya rombongan Nasution menemukan tempat yang dianggap aman yaitu di perbukitan Borogunung, Kelurahan Banjarasri.

Kehadiran Kolonel A.H. Nasution dan stafnya di Kelurahan Banjarasri kurang begitu diperhatikan masyarakat, sebab kedatangannya

dilakukan dengan cara menyamar dan selalu menutupi jati dirinya. Disamping itu secara kebetulan kehadirannya dilakukan bersama-sama pengungsi yang juga mencari tempat yang dianggap aman. Setibanya di daerah Boro, Kolonel A.H. Nasution diantar oleh dua orang, salah satu diantaranya bernama Yantuni. Kepada penduduk yang menemuinya, Kolonel A.H. Nasution selalu mengaku sebagai seorang guru yang berasal dari Sumatera.¹⁶

Selama menempati pos barunya yang berada di perbukitan Borogunung, kemudian Kolonel A.H. Nasution mulai menjalankan aktivitasnya. Dengan tempat strategis yang terletak diatas bukit itu A.H. Nasution bisa melihat ke segala penjuru. Di lereng perbukitan bagian utara Pak Nas bisa memantau dengan jelas apabila ada musuh yang datang dari arah timur. Selain itu aktivitas lainnya yaitu meneruskan kegiatan pos MBKD, Pos X-2. Dari tempat itulah Kolonel A.H. Nasution mengirimkan berita-berita penting melalui radiogram kepada berbagai pos MBKD dan para pejuang yang lain (Hardjowidjono, 1985: 217).

Pada waktu itu sangat sulit bagi para tamu yang hendak bertemu dengan Kolonel A.H. Nasution. Mereka terlebih dahulu harus datang ke pos yang ditempatkan di Kelurahan.¹⁷ Mereka yang akan bertemu Pak Nas diwajibkan menunjukkan identitas diri serta keperluannya.¹⁸ Sesudah segala sesuatunya beres barulah para pemuda menghubungi salah seorang tentara yang diberi tugas sebagai penghubung Pak Nas. Para tamu baru bisa bertemu dengan Kolonel A.H. Nasution setelah mendapat persetujuannya. Sistem keamanan yang cukup ketat itu sebenarnya mengindikasikan bahwa peran pos MBKD Pos X-2 cukup sentral, karena dari tempat itulah berita-berita penting dan perintah-perintah dilakukan. Salah satunya adalah hubungan dengan Pos X MBKD di Kota Yogyakarta, yang diketuai oleh Laoh dan Ibu Nasution. Mereka mengatur hubungan surat menyurat antara Kolonel A.H. Nasution dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden

16 Wawancara dengan Suryati, tanggal 4 September 2007.

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*

Mohammad Hatta di Bangka dengan cara membongkang pesawat UNCI secara diam-diam (Hardjowidjono, 1985: 217).

Berita-berita yang dikirim biasanya disampaikan melalui radiogram yang digerakkan dengan tenaga baterai buatan sendiri (Tashadi, 1992: 128). Biasanya dua orang penduduk Borogunung secara bergantian memutar pedal sepeda untuk mengisi arus baterainya yang akan digunakan pada malam hari. Pengisian baterai itu dimulai dari pukul 15.00-17.00 (Tashadi, 1992; 128).

Berkaitan dengan kebutuhan militer dan pertempuran yang terus berlangsung tentu sangat dibutuhkan peralatan-peralatan yang memadai untuk dapat membantu perjuangan. Dengan kondisi tersebut, maka Banjarasri sebagai suatu daerah yang dipandang relatif cukup aman digunakan untuk tempat pembuatan senjata dan perbaikan peralatan perang seperti misalnya granat gambyok, peluru, detonator, mortir dan berbagai jenis persenjataan lain. Perbaikan dan pembuatan senjata-senjata itu dilakukan di rumah-rumah penduduk desa secara terencana-pencar. Diantaranya di rumah Panjangrejo, Manguntukimin, Secopawiro, Kromowijoyo, Joyopawiro dan Joyorekso (Tashadi, 1992: 1290).

Mengenai peran atau partisipasi masyarakat atau penduduk Banjarasri sudah tidak disangsikan lagi. Latar belakang kebudayaan mereka sangat mendukung di masa pengungsian itu. Pada umumnya penduduk desa memiliki sifat yang ramah dan begitu pula halnya dengan penduduk Banjarasri. Mereka memiliki rasa solidaritas dan jiwa gotong-royong yang masih kuat. Tradisi yang berlandaskan kebudayaan Jawa masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap, tingkah laku dan tata kramanya sangat diwarnai oleh budayanya. Hal semacam inilah yang turut mendukung jalannya revolusi. Perilaku yang ramah, sopan, suka menolong, lugu dan *andap asor* merupakan ciri-ciri khusus yang masih tetap melekat pada masyarakat Banjarasri. Dengan semangat dan jiwa semacam ini yang menjadikan penduduk Banjarasri pada khususnya serta masyarakat Boro pada umumnya siap sedia membantu TNI dalam kondisi suka maupun duka. Kenyataan ini dibuktikan dengan menyediakan

tempat berlindung, perbekalan bahkan selalu siap memanggul senjata. Hubungan vertikal yang diwujudkan dengan sikap hormat pada orang yang dianggap lebih tua maupun pada para pemimpinnya merupakan sifat-sifat yang menguntungkan bagi kelancaran jalannya perjuangan. Dengan kondisi semacam ini, maka rakyat akan mudah untuk digerakkan oleh pemimpinnya, sebagai contoh formal yaitu para perangkat desa.

Sebagaimana dilakukan oleh penduduk Boro yang dengan sukarela menyediakan tempat tinggal bagi para petinggi militer seperti Kolonel A.H. Nasution yang pada mulanya menempati rumah Martowiryo. Kemudian pindah di rumah Kartosentiko dan selanjutnya di rumah Nitirejo yang terletak di perbukitan Borogunung (Tashadi, 1992: 128). Selama di Boro A.H. Nasution bermarkas di Kelurahan. Kemudian apabila beristirahat atau tidur di rumah Nitirejo. Ketika para pejuang berada di daerah Boro penduduk selalu menyambut dengan rasa gembira. Selama mereka tinggal di tempat itu kebutuhan makanan dijamin oleh penduduk dengan kondisi seadanya. Bahan sayur mayur seperti *gori*, *kates* dan kelapa diberikan secara sukarela. Bahkan terkadang Bu Lurah mencegat penduduk yang membawa sayuran dari pasar guna menyerahkan sebagian barang belanjanya kepada pejuang secara sukarela.¹⁹

Sudah barang tentu keberadaan Boro tidak dapat dipisahkan dengan Kelurahan Banjarasri. Boro secara administratif berada di wilayah Kelurahan Banjarasri. Dengan demikian maka suatu kejadian atau peristiwa tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, tetapi saling kait mengkait. Hal yang menguntungkan bagi militer, sebab di Kelurahan Banjarasri kondisi pemerintahannya sudah berjalan dengan teratur. Sudah barang tentu situasi tersebut akan semakin mempermudah segala hal bagi kepentingan perjuangan. Seperti pembentukan Pemerintahan Gerilya Desa beserta perangkatnya yang dapat melaksanakan pemerintahannya secara teratur. Adanya pemerintahan desa yang sudah mapan itu mengakibatkan dengan sendirinya pemerintahan desa beserta aparatnya dapat menampung dan mengurus pengungsi, mengatur pertahanan sipil, perbekalan dan

¹⁹ *Ibid.*

penerangan. Kondisi semacam itu menjadikan pemerintahan desa mampu mendukung kebutuhan perang gerilya (Hardjowidjono, 1985: 214).

Berbagai upaya untuk mendukung jalannya perjuangan akhirnya mampu dilaksanakan yaitu membentuk Barisan Pager Desa. Organisasi ini dibentuk oleh Carik Desa dan para Kepala Dukuh se-Kelurahan Banjarasri. Para anggota Barisan Pager Desa terdiri dari para pemuda desa yang bertugas menjaga keamanan, membantu tugas sosial desa dan menjadi kurir (Hardjowidjono, 1985: 214). Rumah Lurah Sastrowihardjo selain dipakai untuk menjalankan pemerintahan sipil juga disiapkan untuk membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para pejuang. Kecuali itu kantor Kelurahan Banjarasri juga mengatur hubungan antar pengungsi dan mengkoordinasi pemberian bantuan makanan pada para pengungsi, disamping pada para anggota yang melewati daerah tersebut.

Sebenarnya yang datang ke Kelurahan Banjarasri ini jauh lebih banyak pengungsinya dibandingkan dengan para pejuangnya. Kantong-kantong militer yang ada di Kelurahan Banjarasri hanya ada di Jetis dan Borogunung. Pengungsian itu terjadi saat Belanda melakukan pembersihan ke tempat-tempat yang dianggap sebagai basis para pejuang. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sering mendapat serangan dari pihak Belanda adalah Dekso, Paras dan Samigaluh. Daerah itu dianggap oleh Belanda sebagai basis pejuang dan pertahanan militer Republik Indonesia. Sebagai akibatnya penduduk sipil dan militer ada yang menjadi korban. Ketiga daerah itu merupakan daerah yang cukup berdekatan dengan Kelurahan Banjarasri.

Para korban perang itu akhirnya dibawa ke Boro, Banjarasri. Hal itu karena di Dusun Boro ada sebuah rumah sakit yang dikelola oleh para misionaris Katolik. Keberadaan Rumah Sakit St. Yusuf itu tentu sangat besar manfaatnya untuk membantu para korban perang. Para korban perang dibawa oleh para pemuda pejuang, militer maupun anggota Palang Merah Sukarela (Hardjowidjono, 1985: 215). Selain itu keberadaan rumah sakit juga digunakan untuk menampung para korban dari daerah sebelah utara Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Antara lain para korban dari daerah Cebongan, Borobudur, Godean, dan Kebon Agung. Para petugas Palang

Merah itu diantaranya Suster Koleta sebagai pimpinan dan Pastur Zervatias. Para suster dan pastur selalu memberikan pertolongan pengobatan kepada para pejuang yang menjadi korban perang maupun pengungsi. Selain itu di rumah sakit tersebut juga memiliki sembilan orang dokter dan beberapa orang perawat yang mengungsi dari Yogyakarta. Para dokter itu antara lain Dr. Kusen, dr. Hutagalung dan Dr. Subiantara.²⁰

Di Rumah Sakit St. Yusuf ini selain mengadakan pengobatan biasa juga melakukan operasi berat. Aktivitas di Rumah Sakit ini banyak mengalami kendala-kendala yang cukup berat. Seperti persediaan obat-obatan dan peralatan yang sangat terbatas. Saat Rumah Sakit ini akan melakukan aktivitas ternyata obat-obatan yang tersedia sudah habis. Tentu pihak Rumah Sakit harus berusaha untuk mendapatkan obat-obatan itu ke kota. Padahal untuk mendapatkannya harus pergi ke Yogyakarta. Sedangkan saat itu Yogyakarta diduduki oleh tentara Belanda. Walaupun penuh risiko sebab rintangan dan hadangan dari pihak tentara Belanda, para sukarelawan dari Rumah Sakit St. Yusuf tetap pergi ke Kota Yogyakarta untuk mendapatkan obat-obatan yang sangat dibutuhkan.

Pada masa perjuangan itu tentara Belanda belum pernah memasuki Dusun Boro.²¹ Kondisi geografisnya yang berbukit-bukit itulah yang menyebabkan Boro tidak menjadi perhatian tentara pendudukan Belanda. Bagi para pejuang Indonesia kondisi geografis semacam itu dimanfaatkan oleh para anggota TNI untuk melakukan perlawanan. Selain itu faktor lain yaitu adanya koordinasi sistem keamanan yang baik sangat mendukung mekanisme kerja Pos MBKD yang dipimpin oleh A.H. Nasution. Di Dusun Boro yang berbukit-bukit itulah surat-surat penting dibuat yang berisi perintah dan rencana strategi untuk pos-pos MBKD. Surat-surat perintah yang sifatnya sangat rahasia dibawa oleh seorang kurir secara beranting. Pada mulanya dari Borogunung melalui Jetis ke Ngipik, Samigaluh dan seterusnya (Hardjowidjono, 1985: 218). Tugas kurir ini ternyata cukup berat, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya:

20 Wawancara dengan Suryono dan Suryati, tanggal 4 September 2007

21 *Ibid.*

- a. Besar tanggung jawabnya atas penyampaian surat atau lain-lain yang diserahkan kepadanya.
- b. Tahan berjalan lama dan cepat.
- c. Banyak inisiatif/akal untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang mungkin banyak menghalangi perjalanan (Nasution, 1980: 295).

Para kurir ini biasanya diambil dari pemuda desa yang bersedia menjadi kurir dan didampingi oleh seorang tentara (Hardjowidjono, 1985: 218).

Selain itu dapat pula dikatakan bahwa selain kondisi geografisnya juga karena dukungan pihak pemerintahan desa yang mampu memberi pelayanan sosial baik kepada militer maupun kalangan sipil dan mantapnya sistem keamanan di wilayah itu. Berbicara mengenai Dusun Boro tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Kelurahan Banjarasri. Mengingat Boro hanyalah sebuah dusun yang merupakan bagian Kelurahan Banjarasri yang membawahi 23 dusun (Hardjowidjono, 1985: 213). Masing-masing dusun mempunyai peran dan sumbangsih terhadap jalannya revolusi.

Sumbangan dan peran dusun itu seolah melebur menjadi satu yang akhirnya kait mengkait menyatu mewarnai Kelurahan Banjarasri. Tentu itu bukan berarti menghilangkan peran dusun-dusun yang berada di wilayah Kelurahan Banjarasri. Kondisi geografis yang mendukung dan sistem keamanannya yang mantap itu pada akhirnya tidak saja Kolonel Nasution yang berada di Kelurahan Banjarasri. Kelurahan Banjarasri juga mempunyai peranan penting bagi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tashadi, 1992: 129). Kedua pejabat penting itu menyingkir ke Banjarasri sebab Ibukota RI Yogyakarta telah dikuasai oleh tentara Belanda. Para Penegak hukum yang ada di Kelurahan Banjarasri yaitu Jaksa Agung Tirtawinata dan Kepala Kepolisian RI Komisaris Besar Polisi Sosrodanukusumo. Mereka berusaha tetap menjalankan tugasnya masing-masing meski dalam pengungsian, sehingga pemerintahan tetap berjalan dengan lancar.

Jaksa Agung Tirtawinata dan Sosrodanukusumo masing-masing menempati rumah keluarga Pawirosumarno. Para pejabat negara itu selama

di pengungsian selalu berusaha menyembunyikan identitasnya. Mereka hidup meniru penduduk desa setempat sebagai upaya menyesuaikan diri dan untuk menghindari kecurigaan mata-mata musuh. Kebutuhan sehari-hari mereka yang berupa bahan-bahan makanan sebagian diperoleh dari penduduk setempat dan sebagian lagi mereka beli dari penduduk desa (Tashadi, 1992: 130).

Kedua pejabat negara itu Tirtawinata dan Sosrodanukusumo selalu menerima tamu. Para tamu yang akan menemui kedua pejabat negara itu tidak menyolok dan terkadang menyamar seperti penduduk desa. Pertemuan dan pembicaraan biasanya berlangsung sampai larut malam. Keamanan kedua pejabat tinggi negara itu hanya mengandalkan pada para petugas keamanan desa (Tashadi, 1992: 130). Mereka tidak mempunyai pengawal khusus selain seorang ajudan yang dibawa oleh Sosrodanukusumo (Hardjowidjono, 1985: 216). Demikianlah karena situasi dan kondisi yang aman sangat mendukung jalannya pemerintahan di pengungsian.

Namun demikian para pemuda tetap harus waspada dan mewajibkan mereka selalu berhati-hati dalam menjaga keamanan desa. Berbagai upaya dilakukan oleh para pemuda untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi dalam rangka menjaga pejabat negara itu. Setiap tamu yang datang dan ingin bertemu dengan para pejabat diharuskan melewati beberapa pos. keberadaan dan tempat tinggal para pejabat itu selama berada di Banjarasri sangat dirahasiakan.

Pada akhirnya lengkap sudah para pejabat yang berada di Banjarasri yaitu dari Angkatan Darat, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Selama dalam pengungsian itulah biasanya mereka saling bertemu untuk membicarakan segala sesuatu yang timbul dalam masa perjuangan. Beberapa pertemuan yang terjadi biasanya dilakukan secara berpindah-pindah dan selalu tidak tetap. Kadang di rumah Joyorono dan adakalanya berada di rumah Pawirotono. Demikianlah sumbangan dan partisipasi Boro pada khususnya dan Banjarasri pada umumnya di masa revolusi.

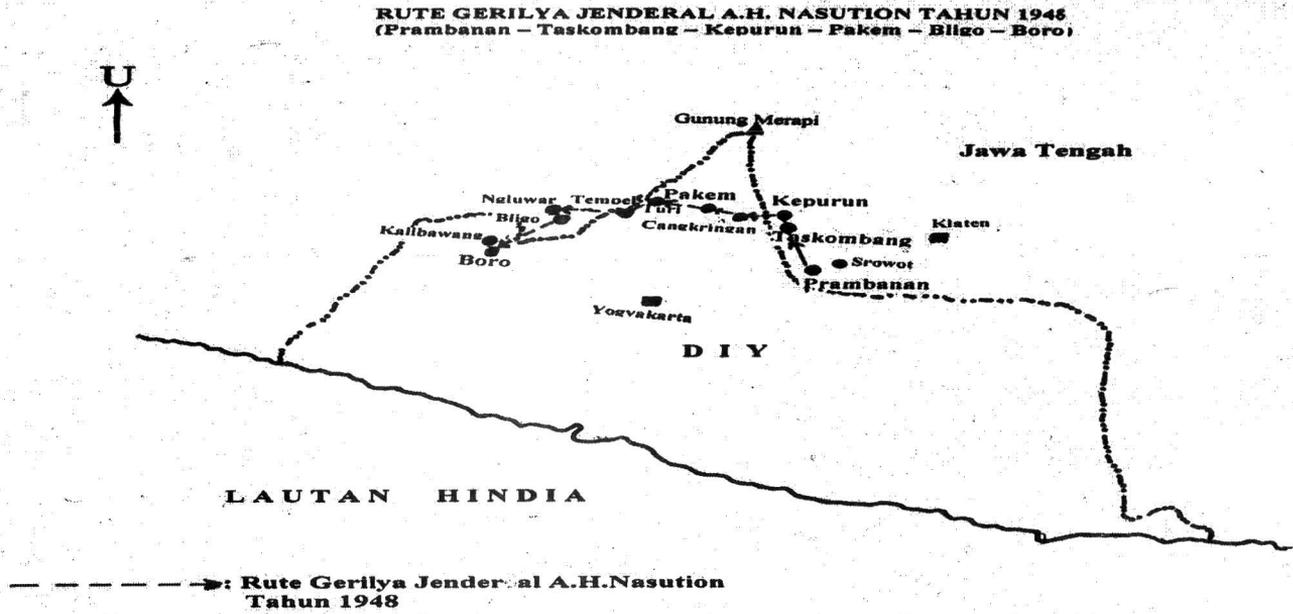


Foto 14: Peta Rute Gerilya A.H. Nasution (1948-1949)

BAB V

PENARIKAN TENTARA BELANDA DAN KEMBALINYA IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA KE YOGYAKARTA

A. Penarikan Tentara Belanda

Agresi Militer Belanda II terhadap Republik Indonesia menggemparkan dunia. Reaksi terhadap tindakan Belanda tersebut muncul dimana-mana. Reaksi itu datang baik dari lingkungan negara-negara boneka ciptaan Belanda sendiri maupun dari negara-negara atau bangsa-bangsa lain yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia seperti :

1. Negara Indonesia Timur, dimana Kabinet Negara Indonesia Timur yang dipimpin Anak Agung Gde Agung pada tanggal 19 Desember 1948 meletakkan jabatan. Tindakan patriotik tersebut lalu diikuti oleh Kabinet Negara Pasundan yang dipimpin Adil Puradireja.
2. Sri Lanka, India dan Pakistan melarang kapal-kapal dan pesawat udara Belanda melewati negerinya. Di Mesir dan Australia para buruh pelabuhan memboikot barang-barang milik Belanda.

Reaksi dalam bidang politik yang kemudian mendapat tanggapan dunia dilancarkan oleh India dan Birma. Di New Delhi pada tanggal 20 hingga 23 Januari 1949 atas prakarsa India dan Birma diselenggarakan Konferensi Asia yang dihadiri oleh utusan dari beberapa negara Asia, Afrika dan juga Australia. Konferensi menghasilkan suatu resolusi mengenai masalah Indonesia yang kemudian akan disampaikan kepada

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi tersebut isinya antara lain:

1. Pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
2. Pembentukan Pemerintahan *ad interim* yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949.
3. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia.
4. Penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat paling lambat pada tanggal 1 Januari 1950 (Kartasasmita, 1983, 201).

Dalam konferensi itu, Birma mengusulkan agar dibentuk tentara sukarela Asia untuk membantu Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Agresi Militer Belanda II juga menarik perhatian PBB, karena secara terang-terangan Belanda merobek-robek Persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara (KTN) yang ditugaskan PBB. Pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang jiwanya mengambil alih Resolusi New Delhi tanggal 23 Januari 1949. Adapun resolusi itu isinya antara lain sebagai berikut :

1. Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Republik Indonesia. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali.
2. Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik di dalam daerah Republik Indonesia oleh Belanda semenjak tanggal 19 Desember 1948.
3. Belanda harus memberikan kesempatan kepada pembesar-pembesar Pemerintah Republik Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta.
4. KTN diganti namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (*United Nations Commission for Indonesia* disingkat UNCI) yang tugasnya menjadi perantara perundingan Indonesia-Belanda dan mempersiapkan terselenggaranya perundingan (Kartasasmita, 1983: 205)

Untuk membantu mencari penyelesaian, UNCI mengadakan kontak dengan pemimpin Republik Indonesia di Bangka. Begitu juga *Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO) mengirim utusan ke Bangka dan mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta serta para pemimpin lainnya dalam usaha mempertemukan pandangan politik. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi tanggal 28 Januari 1949.

Dalam melaksanakan resolusi tersebut UNCI akhirnya berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 4 April 1949. Perundingan Indonesia dan Belanda ini diadakan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran Anggota UNCI dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia di bawah pimpinan Mr. Moh Roem sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. JH. Van Royen. Sebagaimana biasa, perundingan berjalan sangat lamban, karena masih jauhnya kehendak masing-masing pihak. Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka bagi perundingan-perundingan selanjutnya. Sebaliknya pihak Belanda menuntut agar lebih dahulu dicapai persetujuan tentang perintah penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia.

Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan yang dikenal dengan nama *Roem Royen Statements* atau Persetujuan Roem – Royen. Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh ketua delegasi Indonesia Mr. Moh. Roem yang berisi antara lain :

1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
2. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada Negara Republik Indonesia Serikat.
3. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan dan ketertiban.

Kemudian Dr. JH. Van Royen ketua delegasi Belanda membacakan pernyataan yang berisi antara lain:

1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melaksanakan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta.
2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
3. Pemerintah Belanda setuju Republik Indonesia akan menjadi bagian dari pada Republik Indonesia Serikat.
4. KMB akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta (Kartodirdjo, 1977: 68).

Dengan disepakati prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera memerintahkan kepada Sultan Hamengku Buwana IX untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya dari Belanda dan mengatur pengembalian Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Partai yang pertama kali menyatakan setuju dan menerima baik tercapainya Persetujuan Roem – Royen adalah Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Kedua partai itu mengeluarkan pernyataan bersama bahwa Persetujuan Roem – Royen sekalipun masih kurang memuaskan, tetapi merupakan langkah ke arah penyelesaian pertikaian Indonesia – Belanda.

Fihak Angkatan Perang (TNI) menyambut adanya persetujuan itu dengan perasaan curiga. Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tanggal 1 Mei 1949 memperingatkan kepada komanda kesatuan agar tidak memikirkan masalah perundingan. Untuk mempertegas amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 5 Mei 1949 mengeluarkan maklumat yang menyerukan bahwa perundingan yang dilaksanakan itu hanyalah merupakan taktik perjuangan, dan diperingatkan kepada semua komandan agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan

militer dan untuk kepentingan politik. Pada pokoknya dari kalangan TNI tidak ada kepercayaan akan berhasilnya perundingan. Hal ini disebabkan berdasarkan pengalaman dengan Persetujuan Linggarjati dan Renville, hasil perundingan selalu merugikan perjuangan.

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan Roem-Royen pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, BFO dan Belanda di bawah pimpinan Critchley dari UNCI. Adapun hasil perundingan tersebut adalah:

1. Pengembalian Pemerintah Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1949. Setelah tanggal 24 Juni 1949 Karesidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda dan TNI dapat menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu.
2. Mengenai penghentian permusuhan akan diberikan setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.
3. KMB akan dilaksanakan di Den Haag (Kartodirdjo, 1977: 69-70).

Sri Sultan Hamengku Buwana IX selaku Menteri Negara dan Koordinator Keamanan yang telah ditunjuk oleh PDRI untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya dari Belanda dan mengatur pengembalian Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, segera mengadakan persiapan. Dalam melaksanakan tugas ini Sultan Hamengku Buwana IX diberi kekuasaan sepenuhnya untuk mempergunakan segala alat pemerintahan yang sudah ada. Panglima Besar Jenderal Sudirman pun segera mengeluarkan perintah harian kepada Komandan Pasukan Bersenjata di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang isinya agar tetap memelihara kesatuan komando di Daerah Istimewa Yogyakarta dan komandan pasukan tetap tunduk dan taat kepada Komandan Wehrkreise III Letnan Kolonel Suharto.

Penarikan mundur pasukan Belanda segera dimulai setelah Belanda memberitahukan tentang mulainya tanggal penarikan. Sebelum penarikan dimulai pihak Indonesia telah memberikan jaminan kepada Komandan Brigade T bahwa TNI tidak akan mengganggu selama penarikan sedang

berlangsung. Setelah segala persiapan untuk penarikan tentara Belanda selesai, maka pihak Belanda pada tanggal 22 Juni 1949 memberitahukan kepada pihak Republik Indonesia bahwa tentara Belanda akan ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta tanggal 24 Juni 1949 ini sesuai hasil Perundingan Republik Indonesia-BFO dan Belanda pada tanggal 22 Juni 1949.

Untuk melaksanakan penarikan tentara Belanda ini dibentuk *Military Observers* (Milobs) sebagai peninjau. Adapun susunan anggota *Military Observers* yaitu :

1. Pihak UNCI : Kapten Marshal, Letnan Jenderal Alexander, Mayor Godfray, Mayor Laksos.
2. Pihak Republik Indonesia : Sri Sultan Hamengkubuwana IX, KGPAA Paku Alam VIII, Honggowongso, Tahya dan Selo Sumarjan.
3. Pihak Belanda : Kolonel van Langen.

Pada tanggal 24 Juni 1949 rombongan Sri Sultan Hamengku Buwana IX, KGPAA Paku Alam VIII, Honggowongso, Tahya, Selo Sumarjan mulai melaksanakan tugasnya. Anggota UNCI Kapten Marshal dan Letnan Jenderal Alexander ditempatkan pada pihak Indonesia sedangkan Mayor Godfrey, Mayor Laksos ditempatkan pada pihak Belanda. Rombongan *Military Observers* tersebut menuju lapangan Gading dan setibanya di Gading disambut Kolonel van Langen (Notosusanto, 1973: 47).

Untuk menjaga dan menjamin keamanan kedua belah pihak, maka selama tentara Belanda ditarik dari posnya, penduduk disekitar pos dan sepanjang jalan yang akan dilalui tentara Belanda, dilarang keluar rumah. Itu merupakan seruan Sri Sultan Hamengku Buwana IX selaku Menteri Negara dan Koordinator Keamanan yang ditujukan kepada rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seruan ini sangat membantu lancarnya penarikan tentara Belanda.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka pada tanggal 24 Juni 1949 dimulai penarikan tentara Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 24 Juni 1949 itu penarikan tentara Belanda

dari Wonosari, Gunung Kidul. Pukul 09.30 mulailah tentara Belanda meninggalkan Wonosari menuju ke Pos Bunder dengan berjalan kaki. Pada pukul 17.00 TNI masuk menduduki pos Belanda di Wonosari yang telah ditinggalkan.

Pada tanggal 25 Juni 1949 penarikan tentara Belanda dimulai pukul 07.30 dari Desa Grogol, Kapanewan Prambanan. Di Desa Grogol telah siap tentara Belanda yang akan berangkat meninggalkan Pos Grogol menuju Piyungan. Pukul 08.00 tentara Belanda berjalan menuju Sorogedug. Kemudian dari Sorogedug tentara Belanda berjalan menuju Piyungan dan tiba pada pukul 10.00. Pada pukul 11.45 datanglah rombongan tentara Belanda yang bergerak dari Pos Bunder di Piyungan. Jadi tentara Belanda dari Grogol dan Bunder bertemu di Piyungan. Kemudian pukul 12.00 berangkatlah kedua rombongan tentara Belanda menuju Yogyakarta melalui Prambanan. Setelah Pos Piyungan ditinggalkan tentara Belanda, pada pukul 12.15 TNI menduduki Piyungan yang selanjutnya menyerahkan pemerintahan dan segala sesuatunya kepada pamong praja setempat. Sejak Kapanewon Prambanan dikuasai kembali oleh TNI, lebih kurang 1000 orang penduduk yang mengungsi kembali ke daerah masing-masing di Prambanan.

Tanggal 26 Juni 1949 penarikan tentara Belanda dimulai dari Klangon dan Pedes, Kabupaten Bantul. Pada pukul 09.30 tentara Belanda yang berada di Pos Klangon bergerak menuju ke Pos Pedes. Setengah jam kemudian mereka tiba di Pos Pedes, selanjutnya kedua rombongan tentara Belanda meninggalkan Pos Pedes menuju Yogyakarta. Setelah Pos Klangon dan Pedes ditinggalkan tentara Belanda, TNI masuk dan mendudukinya. Selanjutnya oleh TNI Klangon maupun Pedes diserahkan kepada pamong praja setempat.

Pada tanggal 26 Juni 1949 itu juga dilakukan penarikan tentara Belanda di daerah Kedaton Plered, Bantul. Tentara Belanda meninggalkan Pos Kedaton Plered menuju Yogyakarta pada pukul 10.30. Pukul 11.00 Pos Kedaton Pleret telah kosong kemudian diduduki TNI. Setelah Kedaton Plered dikuasai TNI, segala tanggung jawab pemerintahan setempat

diserahkan kepada pamong praja. Pada tanggal 26 Juni 1949 itu juga, mulai pukul 07.45 tentara Belanda meninggalkan Kota Bantul menuju Yogyakarta. Pukul 08.15 pos tentara Belanda telah kosong yang kemudian dikuasai oleh TNI.

Pada tanggal 27 Juni 1949 penarikan tentara Belanda dimulai pukul 09.00 dari daerah Padokan, Bantul. Pukul 09.15 Pos Padokan telah ditinggalkan tentara Belanda dan segera diduduki oleh pihak TNI. Kecuali itu pada pukul 10.30 tentara Belanda meninggalkan Pos Kotagede menuju Yogyakarta. Kemudian pada pukul 10.45 TNI menduduki Pos Kotagede dan selanjutnya tanggung jawab pemerintahan dan lain-lain diserahkan kepada pamong praja setempat. Pukul 11.00 dilakukan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan demikian seluruh daerah Kabupaten Bantul telah kembali kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 28 Juni 1949 penarikan tentara Belanda dimulai pukul 07.30 dari Tanjungtirto, Kalasan. Setelah tentara Belanda meninggalkan Tanjungtirto, pada pukul 09.00 TNI menduduki Tanjungtirto dan menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada pamong praja setempat. Selanjutnya pada pukul 11.30 penarikan tentara Belanda dari Pos Maguwo dilakukan pula dan pukul 12.30 TNI menguasai Maguwo yang sudah ditinggalkan tentara Belanda. Kemudian pukul 13.00 dilaksanakan penyerahan pemerintahan sipil kepada Bupati Sleman yang disaksikan oleh rakyat. Pada pukul 14.00 tentara Belanda meninggalkan Pos Wonocatur dan tidak lama kemudian Wonocatur dikuasai TNI.

Dari Pos Kaliurang, penarikan tentara Belanda dimulai tanggal 28 Juni 1949. Pukul 07.15 rombongan pertama tentara Belanda berangkat menuju Yogyakarta, rombongan kedua berangkat pukul 08.00. adapun TNI menduduki Kaliurang pada pukul 08.15, sedangkan rakyat baru diperbolehkan masuk Kaliurang dua hari kemudian, demi kepentingan keamanan. Hal ini disebabkan Kaliurang merupakan tempat tinggal orang-orang Belanda. Penarikan tentara Belanda dari Pos Kaliurang dilaksanakan pada pukul 09.00 tanggal 28 Juni 1949 itu juga dan berjalan lancar (Soejono, 1977: 59-60)

Pada tanggal 29 Juni 1949 penarikan tentara Belanda dimulai dari Kota Yogyakarta, dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut :

Tahap pertama, dimulai pukul 07.30 tentara Belanda ditarik dari bagian kota sebelah selatan jalan yaitu : Sentul, Secodiningratan, Ngabean, Wirobrajan. Setelah pos-pos didaerah penarikan tahap pertama kosong, barulah TNI masuk sampai di bagian daerah itu sampai garis kurang lebih 500 meter jaraknya dari jalan-jalan tersebut.

Tahap kedua, dimulai pukul 09.30 tentara Belanda ditarik dari antara jalan-jalan di tahap pertama dan sebelah selatan jalan kereta api. Kemudian TNI masuk bagian kota itu sampai garis kurang lebih 500 meter sebelah selatan jalan kereta api.

Tahap ketiga, tentara Belanda ditarik pukul 11.30 dimulai dari bagian kota sebelah utara jalan kereta api dan di sebelah timur Kali Code. Kemudian TNI menduduki bagian kota itu seluruhnya.

Tahap keempat, tentara Belanda mulai ditarik pukul 14.30 dari bagian kota sebelah utara jalan kereta api dan sebelah barat Kali Code. Setelah penarikan tahap keempat selesai, berarti seluruh Kota Yogyakarta telah dikuasai kembali oleh TNI (Notosusanto, 1973: 48; Soerjono, 1977: 60).

Sehari sebelum penarikan tentara Belanda, di Kota Yogyakarta dilakukan penyerahan semua badan-badan dan perusahaan sipil dari pihak Belanda kepada Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 1949 pukul 07.00 dua pesawat terbang Belanda melayang-layang di atas Kota Yogyakarta untuk mengawasi keadaan kota selama penarikan tentara Belanda. Penarikan tentara Belanda berjalan dengan lancar sesuai rencana yang telah ditentukan. Hanya dalam tahap keempat terlambat kurang lebih satu jam dari rencana (Notosusanto, 1973: 49).

Tanggal 30 Juni 1949 merupakan hari terakhir bagi Belanda untuk menarik tentaranya dari daerah Yogyakarta. Pada tanggal 30 Juni itu tentara Belanda ditarik dari Pos Mlati, Sleman mulai pukul 06.30. Satu jam kemudian Pos Mlati telah dikuasai TNI. Pukul 08.30 penarikan tentara Belanda dimulai dari Pos Beran dan berakhir pukul 10.00. Pada pukul 12.30 tentara Belanda telah meninggalkan Pos Medari, kemudian pada pukul

15.00 dilakukan penyerahan tanggung jawab pemerintahan dengan upacara. Pos Tempel ditinggalkan tentara Belanda pukul 15.30, kemudian Tempel dikuasai TNI dan diteruskan penyerahan tanggung jawab pemerintahan kepada pamong praja setempat (Soerjono, 1977: 60).

Setelah Kota Yogyakarta ditinggalkan tentara Belanda, TNI bersama gerilyawan mulai masuk kota menggantikan kedudukan Belanda. Masuknya TNI ke Kota Yogyakarta juga dibagi empat tahap menyesuaikan proses penarikan tentara Belanda.

Tahap pertama, dilakukan dari selatan untuk mengikuti penarikan mundur tentara Belanda dalam tahap pertama dan kedua. Kesatuan TNI ini terdiri Batalyon I, Brigade X, Divisi II di bawah pimpinan Mayor Sarjono masuk kota bersama Komandan *Wehrkreise III* Letnan Kolonel Suharto. Sebelum kesatuan TNI tersebut bergerak masuk kota, mereka menyiapkan diri di tiga tempat sebelah selatan garis Dongkelan-Krapyak-Salakan. Setelah tentara Belanda ditarik dalam tahap pertama, kurang lebih pukul 09.00 tim Milobs memberi tanda bahwa TNI boleh bergerak masuk kota. Gerakan pasukan ini dilakukan dengan teratur dan berjalan kaki.

Tahap kedua, TNI lebih maju lagi masuk kota melalui Gading, dan berhenti di sebelah barat Keben Kasultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwana IX berkenan menyambut kedatangan pasukan TNI dan selanjutnya memimpin langsung masuk kota. Untuk sementara Markas Komando *Wehrkreise III* dan Komando Batalyon I, Brigade X ditempatkan di Kepatihan Danurejan. Sementara TNI bergerak maju, Sri Sultan Hamengku Buwana IX, Komandan *Wehrkreise III* Letnan Kolonel Suharto dan Komandan Batalyon I Mayor Sarjono beserta Seksi Pengawal mengadakan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di halaman Gedung Kepresidenan atau Gedung Agung pada pukul 10.30.

Tahap ketiga, TNI masuk kota dari arah utara, pasukan Militer Akademi yang dipimpin Kapten Wiyogo Atmodarminto, sebelum masuk kota menyiapkan diri di Gejayan. Kemudian KGPAA Paku Alam VIII bersama dua orang dari Milobs datang di Gejayan memberi tanda bahwa pasukan Militer Akademi boleh bergerak masuk kota. Pada pukul 12.00

pasukan Militer Akademi beserta KGPAA Paku Alam VIII berjalan kaki menuju kota dengan rute perjalanan Pelemkecut-Demangan-Pengok terus ke barat dan menempatkan Pos Komandonya, sementara di Rumah Sakit Umum Pusat (sekarang Rumah Sakit Bethesda). Gerakan pasukan Militer Akademi ini berlangsung secara tertib dan teratur. Di halaman Rumah Sakit Umum Pusat ini Pasukan Militer Akademi-bersama KGPAA Paku Alam VIII mengadakan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih.

Tahap keempat, pasukan Militer Akademi bergerak ke barat dan dibagi untuk menempati pos-pos di tempat yang dipandang penting. Pasukan TNI dari Batalyon I dibawah pimpinan Mayor Sarjono dari selatan bergerak ke utara sampai batas kota. Kemudian bermarkas di Gedung *Hogere Burger School* (HBS) Jetis dan mengadakan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih.

Dengan selesainya gerakan dalam tahap keempat ini, maka selesailah gerakan pasukan TNI masuk Kota Yogyakarta. Sejak itu seluruh Kota Yogyakarta telah kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Kemudian kesatuan Mobile Brigade Polisi di bawah pimpinan Letnan Norman Sasono dan Corps Polisi Militer (CPM) di bawah pimpinan Letnan Erman Harirustaman masuk kota dari sebelah barat, terus menuju Asrama Polisi Gayam. Sedangkan Pasukan Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Komisaris Polisi Jen Mohamad masuk kota juga dari sebelah barat langsung menuju Asrama Polisi Patuk. Setelah pasukan tersebut tiba di Asrama Polisi Gayam maupun Patuk terus melaksanakan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih (Soerjono, 1977: 61-62)

Jumlah TNI dari Brigade Mobile seluruhnya berjumlah kurang lebih 2900 orang terdiri 1800 orang TNI dan 1100 orang Brigade Mobile. Pada saat penarikan berlangsung keadaan Kota Yogyakarta sepi. Hal ini disebabkan rumah-rumah penduduk pintunya tertutup dan penduduk tidak boleh keluar rumah. Ini merupakan perintah Sri Sultan Hamengku Buwana IX selaku Menteri Negara dan Koordinator Keamanan. Baru pada sore harinya kota mulai ramai kembali setelah seluruh kota berada dalam tangan Republik Indonesia. Penjagaan dalam kota diperkuat, mulai

dari Tugu sampai Beringharjo dijaga. Orang-orang yang tidak bertugas dilarang lewat jalan tersebut. Kecuali itu juga diadakan jam malam mulai pukul 18.00 sampai 05.00. Baru setelah dirasakan tidak ada gangguan keamanan, penjagaan kota dan jam malam ditiadakan.

Dalam rangka menjaga keamanan Kota Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwana IX memperoleh senjata dari pihak Belanda sejumlah 100 pucuk senjata dengan pelurunya dalam jumlah tidak banyak. Pelaksanaan penyerahan senjata dilaksanakan di Tempel, Sleman. Kecuali itu Sri Sultan Hamengku Buwana IX juga menerima kendaraan, alat-alat kantor, bantuan uang Rp. 6.000.000,- untuk kelancaran melaksanakan jalannya pemerintahan Republik Indonesia (Notosusanto, 1973: 50; Nasution, 1979: 59).

Setelah tentara Belanda meninggalkan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta berhasil dikuasai kembali TNI, Sri Sultan Hamengku Buwana IX mengeluarkan selebaran dan juga berpidato di corong Radio Republik Indonesia isinya antara lain bahwa pada tanggal 30 Juni 1949 kekuasaan pemerintah di seluruh daerah di Yogyakarta telah kembali. Sementara kekuasaan sipil dan militer dipegang dan dijalankan oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX, selaku Menteri Negara dan Koordinator Keamanan. Segala peraturan yang ada sebelum hari dan tanggal pengembalian pemerintah Republik Indonesia berlaku lagi sampai diadakan peraturan baru. Kemudian apabila keadaan sudah mengijinkan segera presiden dan wakil presiden beserta anggota pemerintahan lainnya, kembali ke Yogyakarta.

Pada tanggal 30 Juni 1949 itu juga Sri Sultan Hamengku Buwana IX berpakaian militer naik kendaraan Jeep mengadakan inspeksi di seluruh kota. Dalam inspeksi ini Sri Sultan Hamengku Buwana IX di dampingi seorang wartawan luar negeri dan beberapa wartawan dalam negeri. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui keamanan, jangan sampai terjadi adanya sisa-sisa tentara Belanda yang masih tertinggal dan membuat kekacauan. Meskipun pada waktu itu penduduk belum diperbolehkan ke luar rumah, tetapi di mana-mana kelihatan beberapa orang ke luar dari rumah menyambut rombongan Sultan Hamengku Buwana IX.

Sementara itu, karena keadaan di daerah Yogyakarta mulai aman kembali, maka rakyat yang waktu Agresi Militer Belanda II mengungsi berangsur-angsur kembali ke Kota Yogyakarta. Mereka sebagian besar adalah orang-orang yang anti Belanda, termasuk sebagian besar petugas pemerintahan sipil republik yang selama perang kemerdekaan tetap menjalankan tugasnya di pengungsian (Soerjono, 1977: 60)

Pada tanggal 30 Juni 1949 itu hanya daerah Yogyakarta yang ditinggalkan oleh tentara Belanda. Sedangkan di kota-kota lain tentara Belanda masih bercokol dengan angkuhnya. Jadi daerah Yogyakarta pada saat itu merupakan daerah yang paling aman di seluruh Indonesia.

B. Ibukota RI Kembali ke Yogyakarta

Ketika Yogyakarta ditetapkan menjadi ibukota pemerintah Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 4 Januari 1946 (Tashadi, 1995: 63). Kota Yogyakarta terus menerus menjadi target serangan Belanda. Sudah barang tentu aksi militer Belanda itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang cukup matang. Tujuan utamanya yaitu jika ibukota negara sudah dapat dikuasai dan para pimpinan negara serta pemerintahan dapat ditawan, maka akan berakibat hancur dan tamatnya negara Republik Indonesia. Namun para petinggi negara baik sipil dan militer tidak menyerah begitu saja. Berbagai cara ditempuh antara lain melalui jalan perundingan yang terus menerus diupayakan, tetapi selalu mengalami jalan buntu. Sebagai akibatnya Belanda terus melancarkan berbagai agresi. Diantaranya Agresi Belanda I yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan Agresi Belanda II tanggal 19 Desember 1948.

Namun dari berbagai agresi yang dilakukan oleh Belanda ke wilayah Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta tersebut selalu mendapat perlawanan dari pihak pejuang Indonesia yang ingin tetap mempertahankan kemerdekaannya hingga titik darah penghabisan. Perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang itu ternyata membawa hasil. Pada akhirnya tentara Belanda harus meninggalkan Kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949 (Tashadi, 1995: 99). Setelah Belanda meninggalkan Kota Yogyakarta,

maka para gerilyawan mulai menggantikan kedudukan pasukan Belanda. Proses masuknya TNI dan para gerilyawan ke Ibukota Yogyakarta tentu saja sudah diperhitungkan secara matang dan dalam kondisi siap siaga serta waspada. Oleh sebab itu masuknya TNI dan para gerilyawan perlu menyesuaikan dengan penarikan tentara Belanda.

Dengan berkumpulnya kembali pasukan-pasukan yang terdiri dari berbagai kesatuan ke Kota Yogyakarta itu menandakan bahwa Ibukota Yogyakarta telah aman. Tanda-tanda bahwa Kota Yogyakarta telah aman juga diikuti oleh para pengungsi yang mulai memasuki kota yang telah lama ditinggalkan. Mereka memasuki Kota Yogyakarta setelah tanggal 30 Juni 1949 (Sutardono, 1977: 62). Kemudian pada tanggal tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX melakukan inspeksi dan pemeriksaan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Dengan mengendarai Jeep dan berpakaian militer Sri Sultan ingin memastikan kondisi dan situasi keamanan di Kota Yogyakarta. Inspeksi itu dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi. Diantaranya kemungkinan adanya sisa-sisa tentara Belanda yang hendak membuat kekacauan. Nampaknya inspeksi yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX itu mampu menarik perhatian masyarakat. Mereka menyambut rombongan Sri Sultan. Padahal pada waktu itu ada larangan bahwa rakyat tidak boleh keluar rumah. Dalam inspeksi itu Sri Sultan HB IX disertai dengan beberapa Wartawan Dalam Negeri dan seorang Wartawan Luar Negeri.

Kondisi dan situasi keamanan di Yogyakarta tentu sangat diharapkan oleh semua pihak, baik oleh para pemimpin maupun seluruh masyarakat serta warga negara yang berjiwa nasionalis. Dengan masuknya para pejuang ke Kota Yogyakarta sudah dapat dipastikan bahwa Kota Yogyakarta dalam kondisi yang aman dan sudah bebas dari cengkeraman kekuasaan Belanda. Dengan demikian, maka diharapkan presiden dan para pemimpin pemerintahan dapat segera kembali ke Kota Yogyakarta untuk menjalankan roda pemerintahannya.

Untuk menyambut kedatangan para pemimpin pemerintahan, maka segala sesuatu telah dipersiapkan dengan baik. Berbagai upaya dilakukan

diantaranya dengan pembersihan kota. Corat-coret berupa kata-kata anti Belanda yang terdapat di tembok-tembok segera dibersihkan. Semua bersatu padu, bergotong-royong mempercantik Kota Yogyakarta. Para tentara Republik Indonesia untuk sementara melupakan tugas-tugasnya setelah berjuang di daerah pedesaan. TNI kemudian bergabung dengan masyarakat ikut serta membersihkan kota untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu para pemimpin pemerintahan tiba kembali ke Yogyakarta. Di sepanjang Malioboro terpampang spanduk-spanduk yang bertuliskan slogan-slogan yang berbunyi:

“Selamat datang Pemerintahku, rakyat tetap taat dibelakangmu”.
“Hanya rakyat yang mau merdeka mencapai cita-cita laksanakanlah itu” (Sutardono, 1977: 63)

Menilik slogan-slogan itu jelas bahwa rakyat sangat mendukung pemerintahnya untuk segera dapat menjalankan fungsinya. Mereka ingin segera merasakan nikmatnya kemerdekaan dan terlepas dari cengkeraman pihak asing. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk ditegakkan, agar masyarakat jangan membuat kekacauan-kekacauan dan juga keamanan nampak terpampang jelas dalam spanduk. Akhirnya Kota Yogyakarta yang baru saja dibersihkan dipenuhi lagi oleh poster-poster yang memenuhi dinding-dinding rumah maupun gedung-gedung. Bendera Merah Putih mulai dikibarkan pada tanggal 6 Juli 1949. Rakyat berdiri di kanan-kiri jalan yang akan dilalui rombongan presiden.

Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan tiba di Yogyakarta dari tempat tawanannya di Pulau Bangka (Tashadi, 1995: 99). Setibanya presiden dan rombongan di Yogyakarta, segera tim yang terdiri dari Dr. J. Leimena, Mohammad Natsir dan Dr. A. Halim berhasil menghubungi pemerintahan PDRI. Kemudian tepat pada tanggal 9 Juli 1949 rombongan PDRI pimpinan Mr. Syarifuddin Prawiranegara tiba di Yogyakarta (Tashadi, 1995: 99)

Rombongan Presiden Soekarno yang tiba di Yogyakarta pada pukul 12.25 disertai dengan Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri Luar Negeri

Haji Agus Salim, Menteri Pendidikan Ali Sastroamijoyo, Ketua Delegasi Moh. Roem, dan Kepala Staf Angkatan Perang Suryadarma (Sutardono, 1977: 64). Saat Presiden Soekarno dan rombongan tiba di lapangan terbang Maguwo kedatangannya disambut sendiri oleh Menteri Negara dan Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX beserta para menteri yang berada di Yogyakarta dan panitia penyambutan pemerintah RI maupun para pembesar lain. Kedatangan Presiden disambut dengan upacara resmi. Kemudian Presiden Soekarno mengadakan pemeriksaan barisan kehormatan. Setelah upacara penyambutan di Maguwo selesai dilakukan, maka rombongan Presiden kemudian menuju istana. Di istana upacara penyambutan hanya dilakukan secara singkat. Presiden Soekarno mengucapkan rasa terimakasih dengan mengucapkan pidato yang berisi:

“...kembalinya Pemerintah ke Yogya adalah nyata bahwa kemerdekaan harus dilanjutkan. Dua faktor utama yang memungkinkan kembalinya pemerintah itu ialah kekuatan dan keuletan rakyat dan bantuan dunia internasional. Dengan berdoa bersyukur kepada Tuhan atas berkah dan ridlonya lebih dari yang sudah-sudah, kita harus insyaf hendaknya, bahwa hanya dengan persatuan yang menjadi sendi perjuangan kita akan tercapailah cita-cita kita” (Sutardono, 1977: 64).

Setelah para pejabat tinggi negara sudah berada di Yogyakarta ada salah seorang pejabat yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Pejabat itu adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang telah memimpin perang gerilya selama tujuh bulan dimulai sejak 19 Desember 1948-10 Juli 1949. Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Koordinator Keamanan RI dan Gubernur Militer Daerah Militer III yang waktu itu dijabat oleh Gatot Subroto mengutus Komandan Wehrkreise III Letkol Suharto, agar melaporkan situasi dan kondisi keamanan serta persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan di Yogyakarta sekaligus ditugaskan menjemput Panglima Besar Jenderal Sudirman dari medan gerilya. Akhirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tanggal 10 Juli 1949 tiba di Ibukota Yogyakarta (Muryantoro, 1993: 160). Kedatangan Panglima Besar Jenderal Sudirman

disambut dengan upacara militer yang dilakukan oleh TNI Brigade X yang dikomandani oleh Letkol Suharto (Tashadi, 1995: 99).

Dengan berkumpulnya kembali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan PDRI, para Menteri dan Panglima Besar TNI di Yogyakarta menandakan bahwa pimpinan negara baik sipil maupun militer sudah lengkap, sehingga dapat menjalankan kembali roda pemerintahan. Pada tanggal 13 Juli 1949 mandat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia lagi yang diwakili oleh Wakil Presiden / Perdana Menteri Moh. Hatta, maka berakhirilah masa PDRI (Tashadi, 1995: 100). Dengan demikian Ibukota Republik Indonesia telah kembali ke Yogyakarta. Selain itu pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Dalam sidang diputuskan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap Koordinator Keamanan (Muryantoro, 1993: 160).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kolonel A.H. Nasution yang sering disapa dengan sebutan Pak Nas, pada masa Perang Kemerdekaan Kedua (1948-1949) dikenal sebagai seorang arsitek perang rakyat semesta. Hasil pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk surat-surat perintah, maklumat, instruksi-instruksi, dan sebagainya menunjukkan bahwa tingkat kematangan intelektual Pak nas sangat luar biasa.

Pemikiran Pak Nas tentang perang gerilya dapat dipastikan, tidak dibuat di dalam sebuah gedung yang megah dan ber-AC, namun lahir di tempat yang jauh dari keramaian kota, yakni di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Desa Taskombang dan Desa Kepurun (Kabupaten Klaten), serta di perbukitan Menoreh di Dusun Borogunung, Desa Banjarasri (Kabupaten Kulonprogo)

Konsep perang gerilya yang dikemukakan oleh Pak Nas itu meliputi seluruh aspek perjuangan gerilya dalam mempertahankan kemerdekaan, mulai dari taktik bertempur, menghindari agitasi, perhubungan, nonkooperasi, kekacauan dan kabar bohong, pembentukan Payer (Pasukan Gerilya) Desa, kesehatan, dan sebagainya. Dengan instruksi-instruksi itulah maka tiap-tiap komandan di daerah mempunyai pegangan yang pasti untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda.

Konsep perang gerilya juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam waktu yang singkat seluruh Pulau Jawa telah menjadi medan perang rakyat total melawan Belanda. Terbukti Belanda kewalahan menghadapi perlawanan yang sangat berat itu. Dari kenyataan itu

membuktikan bahwa manunggalnya TNI dengan rakyat merupakan sebuah kekuatan yang dahsyat yang tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan yang tentunya mempunyai persenjataan lengkap dan modern. Pada akhirnya, Perang Rakyat Semesta itu memperoleh kemenangan, antara lain ditandai dengan dikembalikannya ibukota RI Yogyakarta beserta para pemimpinya.

B. Saran

Penelitian tentang “Rute Perjuangan Gerilya A.H. Nasution dari Taskombang sampai Perbukitan Menoreh pada Masa Agresi militer Belanda II (1948-1949)” ini merupakan sebuah rintisan awal. Untuk itu kepada para peneliti sejarah, peminat sejarah, dan pemerhati sejarah diharapkan dapat menindaklanjuti penelitian semacam itu.

Untuk menguak lebih lanjut tentang perjuangan gerilya Pak Nas, maka diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Pusat Sejarah TNI-AD, Depdiknas, atau Depsos. Dengan demikian peran Pak Nas pada masa revolusi akan dapat terungkap dengan lebih jelas dan lebih lengkap.

Selain itu, kepada instansi-instansi yang mempunyai wewenang dalam hal pembinaan pendidikan, pembinaan kesadaran berbangsa dan cinta tanah air untuk segera menerbitkan serta mempublikasikan tulisan-tulisan semacam itu agar sejarah perjuangan bangsa tidak dengan mudah dilupakan oleh generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, D.C.

2003 *Peristiwa Madiun 1948, Kudeta atau Konflik Internal Tentara?* (terjemahan Dwi Pratomo Yulianto dan Lilik Suryo Nugrohojati), Media Pressindo, Yogyakarta.

Baghis

1980 "Beberapa Catatan Sekitar Markas Besar Komando Jawa (MBKD)" dalam *Vidya Yudha*, No. 38. Disbintal Mabes TNI-AD, Jakarta.

Haji, G., dkk.

2004 *Bunga Rampai, Penelitian Pengkajian Koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta*. Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta.

Hardjowidjono, D., dkk.

1987 *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta* (buku kedua) Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Cetakan Ke II, Yogyakarta.

Heijboer, P.

1998 *Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945-1949* (terjemahan W.S. Karnera), Kerjasama PT Gramedia Widiasarana Indonesia dengan KITLV, Jakarta.

Kartasasmita, G., dkk.

1983 *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. PT. Tira Pustaka, Jakarta

Kartodirdjo, S., dkk.

1977 *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kementerian Penerangan

1953 *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*, Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, Jakarta.

Marsoedi, Ch.

1987 "Peranan Militer dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Periode 1945-1949", *Ceramah*, Tanggal 20 Agustus. Kerjasama MSI Cabang Yogyakarta dengan Proyek Penelitian Pengkajian Kebudayaan Nusantara bagian Jawa dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta.

Moehkardi

1993 *Akademi Militer Yogya dalam Perjuangan Fisik 1945-1949*, Yayasan Kota Baru, Jakarta

Muryantoro, H.

1995 "Kepuran Pada Masa Revolusi", dalam *Laporan Penelitian Jarahnitra*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta.

Nasution, A.H.

1953 *Pokok-pokok Gerilja dan Pertahanan Indonesia di Masa Yang Lalu dan Yang Akan Datang*. Pembimbing, Djakarta.

1966 *Sedjarah Perdjjuangan Nasional Dibidang Bersendjata*. Bookstore, Jakarta.

1983 *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 2: Kenangan Masa Gerilya*. Gunung Agung, Jakarta.

1994 *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9-10*. Dinas Sejarah AD-Angkasa, Bandung.

Nasution, J.S.

2001 *Pak Nas dalam Kenangan*. Pusjarah dan Tradisi TNI, Jakarta.

Notosusanto, N.

1973 *Markas Besar Komando Djawa*. Pusjarah ABRI Dephankam, Jakarta.

1978 *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Yayasan Idayu, Jakarta.

Poerwokoesoemo, S.

1987 "Dari Proklamasi sampai Yogya Kembali", *Makalah*, Tanggal 20 Agustus. Kerjasama MSI Cabang Yogyakarta dengan Proyek Penelitian Pengkajian Kebudayaan Nusantara bagian Jawa dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta

Simatupang, T.B.

1980 *Laporan dari Banaran*. Sinar Harapan, Jakarta.

Soerjono, R.H., dkk.

1997 *Sewindu Monumen Yogyakarta Kembali*, Yayasan Monumen Yogya Kembali, Yogyakarta.

Soetardono

1997 *Sewindu Monumen Yogya Kembali*, Kerjasama Yayasan Monumen Yogya Kembali dengan PT Markha Werdhi Legalindo, Yogyakarta.



Sufian, H.M.

1987 *Maeda memilih Republik: Kisah Perjuangan, ITB, Bandung.*

Sumarjono

1984 "Sejarah Stason Radio AURI P.C. II di Desa Banaran, Kelurahan Playen, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta", *Catatan Pribadi*, Tanggal 18 November.

Tashadi, dkk.

1982 *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan : Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945-1949*, Proyek Inventarisasi Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta.

Yayasan 19 Desember 1948

1998 *19 Desember 1948, Perang Gerilya, Perang Rakyat Semesta.* Mediaksara Grafika, Jakarta.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ny. Klumpuk Yosodisastro
Umur : 80 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sapen, Manisrenggo, Klaten

2. Nama : Ny. Nitirejo
Umur : 90 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Borogunung, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo

3. Nama : Suryono
Umur : 75 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo

4. Nama : Suryati
Umur : 72 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo

5. Nama : Saeran
Umur : 92 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kepurun, Manisrenggo, Klaten

6. Nama : Tamzis
Umur : 93 Tahun
Pekerjaan : Mantan Carik Taskombang, Manisrenggo, Klaten
Alamat : Taskombang, Manisrenggo, Klaten



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
YOGYAKARTA

ISBN 978-979-8971-38-9

